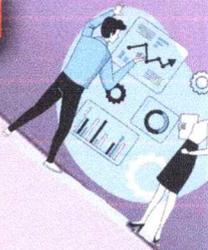
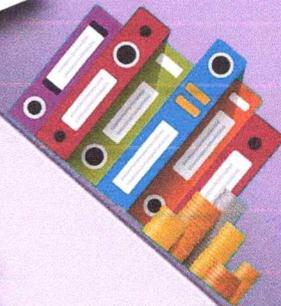


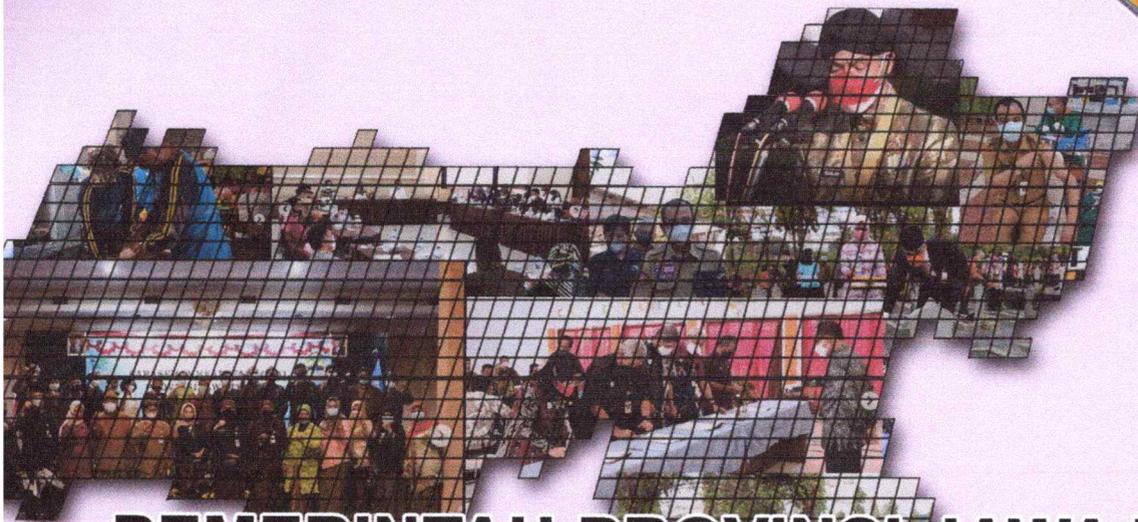


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Tahun
Anggaran
2021



Jateng
gayeng



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan No. 12 Telp. (024) 8311729, Fax. (024) 8450704 Semarang
E-mail : dinsos@jawatengah.go.id Web Site : www.dinsos.jawatengah.go.id



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD**

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024 - 8311729
Faksimile 024 – 8450704 laman <http://dinsos.jatengprov.go.id>.
Surat Elektronik: dinsos@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH**



HARSO SUSILO, ST, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19710509 199903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1.2	Retribusi Daerah	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.097.000	96.005.900	121,38	(16.908.900)
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.500.000	12.100.000	142,35	(3.600.000)
	Retribusi Penyewaan Tanah	60.997.000	66.805.900	109,52	(5.808.900)
	Retribusi Pemakaian Ruangan	9.600.000	17.100.000	178,13	(7.500.000)
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	13.000.000	13.335.000	102,58	(335.000)
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	13.000.000	13.335.000	102,58	(335.000)
	Jumlah Pendapatan	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
5	BELANJA DAERAH	217.396.082.000	207.293.980.750	95,35	10.102.101.250
5.1	BELANJA OPERASI	216.691.082.000	206.593.322.309	95,34	10.097.759.691
5.1.1	Belanja Pegawai	98.018.804.000	93.210.181.072	95,09	4.808.622.928
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	47.245.783.000	45.003.482.798	95,25	2.242.300.202
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	34.380.567.000	33.831.448.686	98,40	549.118.314
	Belanja Gaji Pokok PNS	34.380.567.000	33.831.448.686	98,40	549.118.314
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.201.910.000	3.013.706.674	94,12	188.203.326
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.201.910.000	3.013.706.674	94,12	188.203.326
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.297.980.000	949.750.000	73,17	348.230.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.297.980.000	949.750.000	73,17	348.230.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.082.106.000	906.720.000	83,79	175.386.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.082.106.000	906.720.000	83,79	175.386.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.145.528.000	1.066.815.000	93,13	78.713.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.145.528.000	1.066.815.000	93,13	78.713.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.796.424.000	1.760.819.880	98,02	35.604.120
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.796.424.000	1.760.819.880	98,02	35.604.120
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	305.121.000	161.498.514	52,93	143.622.486
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	305.121.000	161.498.514	52,93	143.622.486
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	626.000	435.267	69,53	190.733
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	626.000	435.267	69,53	190.733
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.705.467.000	3.035.153.730	81,91	670.313.270
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.705.467.000	3.035.153.730	81,91	670.313.270
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	82.514.000	69.283.764	83,97	13.230.236
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	82.514.000	69.283.764	83,97	13.230.236
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	247.540.000	207.851.283	83,97	39.688.717
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	247.540.000	207.851.283	83,97	39.688.717
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.773.021.000	48.206.698.274	94,95	2.566.322.726
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.265.947.000	43.017.204.734	97,18	1.248.742.266
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.265.947.000	43.017.204.734	97,18	1.248.742.266
5.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.507.074.000	5.189.493.540	79,75	1.317.580.460
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.507.074.000	5.189.493.540	79,75	1.317.580.460
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.918.528.000	83.422.141.237	98,24	1.496.386.763

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1	Belanja Barang	51.100.341.000	50.068.585.475	97,98	1.031.755.525
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis	32.673.570.000	32.554.600.579	99,64	118.969.421
	Belanja Alat Tulis Kantor	706.014.000	705.354.306	99,91	659.694
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	319.816.000	318.495.904	99,59	1.320.096
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	139.527.000	137.706.800	98,70	1.820.200
	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.202.993.000	1.200.009.070	99,75	2.983.930
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	288.830.000	285.805.000	98,95	3.025.000
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.400.000	3.772.000	44,90	4.628.000
	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.176.355.000	1.176.257.500	99,99	97.500
	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	176.240.000	175.867.724	99,79	372.276
	Belanja Perkakas Kerja	72.250.000	72.250.000	100	0
	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	90.372.000	90.372.000	100	0
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	118.010.000	117.410.000	99,49	600.000
	Belanja Bahan Peraga	31.278.000	31.278.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	389.113.000	388.309.975	99,79	803.025
	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	108.329.000	108.328.800	100	200
	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	869.809.000	869.809.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	25.136.000	25.136.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	16.767.000	16.767.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	7.330.000	7.330.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	31.771.000	31.771.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	384.500.000	364.500.000	94,80	20.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	1.225.051.000	1.223.246.000	99,85	1.805.000
	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	25.285.679.000	25.204.824.500	99,68	80.854.500
5.1.2.1.2	Belanja Bahan/Material	16.998.489.000	16.097.808.824	94,70	900.680.176
	Belanja Bahan Obat-Obatan	242.053.000	242.053.000	100	0
	Belanja Bahan dan Pangan	16.395.961.000	15.495.283.124	94,51	900.677.876
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	250.655.000	250.652.700	100	2.300
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	109.820.000	109.820.000	100	0
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan	483.025.000	482.234.600	99,84	790.400
	Belanja Cetak	331.819.000	331.629.000	99,94	190.000
	Belanja Penggandaan	151.206.000	150.605.600	99,60	600.400
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman	759.632.000	748.870.472	98,58	10.761.528
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260.987.000	250.719.750	96,07	10.267.250
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	109.950.000	109.455.722	99,55	494.278
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	388.695.000	388.695.000	100	0
5.1.2.1.6	Belanja Pakaian Kerja	178.125.000	177.571.000	99,69	554.000
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	178.125.000	177.571.000	99,69	554.000
5.1.2.1.7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.500.000	7.500.000	100	0
	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000	7.500.000	100	0
5.1.2.2	Belanja Jasa	21.487.413.000	21.141.301.809	98,39	346.111.191
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	20.334.242.000	20.004.682.571	98,38	329.559.429
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	989.210.000	989.060.000	99,98	150.000
	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	39.880.000	31.720.000	79,54	8.160.000
	Belanja Jasa Pengurus/ Penyimpan BMD	14.400.000	14.400.000	100	0
	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	110.050.000	110.050.000	100	0
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	1.135.512.000	1.131.332.000	99,63	4.180.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.674.000	23.674.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	253.840.000	253.840.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	375.600.000	373.307.624	99,39	2.292.376
	Belanja Telepon	789.778.000	699.895.402	88,62	89.882.598
	Belanja Air	562.490.000	510.462.895	90,75	52.027.105
	Belanja Listrik	1.586.963.000	1.522.841.738	95,96	64.121.262
	Belanja Surat Kabar/Majalah	58.877.000	58.869.000	99,99	8.000
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	7.200.000	7.135.469	99,10	64.531
	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	378.248.000	378.247.893	100	107
	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	12.000.000	12.000.000	100	0
	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	40.600.000	38.800.000	95,57	1.800.000
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	1.645.390.000	1.560.391.050	94,83	84.998.950
	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	11.320.400.000	11.308.825.500	99,90	11.574.500
	Belanja Jasa Uang Harian Peserta Kegiatan	990.130.000	979.830.000	98,96	10.300.000
5.1.2.2.2	Belanja Jasa Asuransi	826.100.000	810.149.738	98,07	15.950.262
	Belanja Asuransi Kesehatan	646.100.000	631.170.638	97,69	14.929.362
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	180.000.000	178.979.100	99,43	1.020.900
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000	1.000.000	100	0
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000	1.000.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Alat Berat	3.400.000	3.400.000	100	0
	Belanja Sewa Generator Set	3.400.000	3.400.000	100	0
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.600.000	52.548.500	99,90	51.500
	Belanja Sewa Meja/Kursi	13.100.000	13.050.000	99,62	50.000
	Belanja Sewa Mesin Fotokopi	31.500.000	31.498.500	100	1.500
	Belanja Sewa Sound System	8.000.000	8.000.000	100	0
5.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultasi	114.000.000	113.450.000	99,52	550.000
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	48.000.000	47.753.000	99,49	247.000
	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	24.000.000	24.000.000	100	0
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	42.000.000	41.697.000	99,28	303.000
5.1.2.2.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	156.071.000	156.071.000	100	0
	Belanja Bimbingan Teknis	156.071.000	156.071.000	100	0
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	3.268.186.000	3.253.071.160	99,54	15.114.840
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455.525.000	453.940.900	99,65	1.584.100
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	20.000.000	19.950.000	99,75	50.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.400.000	16.400.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	55.605.000	55.605.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.200.000	11.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000	2.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	3.300.000	3.300.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.000.000	4.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.200.000	18.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	253.490.000	252.455.900	99,59	1.034.100

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.650.000	6.350.000	95,49	300.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	8.260.000	8.260.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.120.000	40.120.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.900.000	9.900.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.400.000	6.200.000	96,88	200.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.656.551.000	2.643.203.960	99,50	13.347.040
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	991.180.000	990.725.160	99,95	454.84
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000	25.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	32.000.000	31.999.800	100	200
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	82.475.000	82.475.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.000.000	49.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	5.000.000	5.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	131.896.000	131.880.000	99,99	16.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.340.000.000	1.327.124.000	99,04	12.876.000
5.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.600.000	7.600.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.200.000	1.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	6.400.000	6.400.000	100	0
5.1.2.3.6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	148.510.000	148.326.300	99,88	183.700
	Belanja Jasa Servis	39.250.000	39.250.000	100	0
	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.260.000	9.260.000	100	0
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.816.300	99,82	183.700
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.908.903.000	2.854.887.793	98,14	54.015.207
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.856.000	2.809.547.793	98,14	53.308.207
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.856.000	2.809.547.793	98,14	53.308.207
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.047.000	45.340.000	98,46	707.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.047.000	45.340.000	98,46	707.000
5.1.2.5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.153.685.000	6.104.295.000	99,20	49.390.000
5.1.2.5.1	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.582.900.000	5.539.110.000	99,22	43.790.000
	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.582.900.000	5.539.110.000	99,22	43.790.000
5.1.2.5.3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	570.785.000	565.185.000	99,02	5.600.000
	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	570.785.000	565.185.000	99,02	5.600.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
5.1.6.1.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
5.2	BELANJA MODAL	705.000.000	700.658.441	99,38	4.341.559
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.000.000	516.305.441	99,29	3.694.559
5.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar	25.000.000	25.000.000	100	0
5.2.2.1.3	Belanja Modal Alat Bantu	25.000.000	25.000.000	100	0
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	25.000.000	25.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.000.000	327.930.441	99,37	2.069.559
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	40.500.000	40.177.590	99,20	322.410
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.500.000	40.177.590	99,20	322.410
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	289.500.000	287.752.851	99,40	1.747.149
	Belanja Modal Meubelair	105.000.000	103.795.000	98,85	1.205.000
	Belanja Modal Alat Pendingin	50.000.000	50.000.000	100	0
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	134.500.000	133.957.851	99,60	542.149
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	165.000.000	163.375.000	99,02	1.625.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000	163.375.000	99,02	1.625.000
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	165.000.000	163.375.000	99,02	1.625.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
5.2.3.1.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
	Belanja Modal Asrama	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
	Jumlah Belanja	217.396.082.000	207.293.980.750	95,35	10.102.101.250
	Surplus/(Defisit)	(217.303.985.000)	(207.184.639.850)	95,34	(10.119.345.150)


KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
HARSO SUSILO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710509 199903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	#DIV/0!	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	#DIV/0!	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	#DIV/0!	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	#DIV/0!	-
8	Pajak Rokok		-	-	#DIV/0!	-
9	Retribusi Daerah		92,097,000.00	109,340,900.00	118.72	103,260,000.00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	#DIV/0!	-
11	Retribusi Jasa Usaha		92,097,000.00	109,340,900.00	118.72	103,260,000.00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	#DIV/0!	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
20	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	#DIV/0!	-
21	Jasa Giro		-	-	#DIV/0!	-
22	Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-	#DIV/0!	-
23	Pendapatan Bunga		-	-	#DIV/0!	-
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-	#DIV/0!	-
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	#DIV/0!	-
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	#DIV/0!	-
28	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	#DIV/0!	-
31	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	#DIV/0!	-
32	Pendapatan BLUD		-	-	#DIV/0!	-
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	#DIV/0!	-
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-	#DIV/0!	-
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	#DIV/0!	-
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
38	Pendapatan Zakat		-	-	#DIV/0!	-
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa		-	-	#DIV/0!	-
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD		-	-	#DIV/0!	-
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		92,097,000.00	109,340,900.00	118.72	103,260,000.00
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
45	Dana Perimbangan		-	-	#DIV/0!	-
46	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	#DIV/0!	-
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	#DIV/0!	-
48	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
49	Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
50	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
53	Pendapatan Hibah		-	-	#DIV/0!	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	#DIV/0!	-
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	#DIV/0!	-
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	#DIV/0!	-
59	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
60	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
62	Lain-lain Pendapatan		-	-	#DIV/0!	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		92,097,000.00	109,340,900.00	118.72	103,260,000.00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		98,018,804,000.00	93,210,181,072.00	95.09	118,193,752,633.00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		47,245,783,000.00	45,003,482,798.00	95.25	47,520,005,664.00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		50,773,021,000.00	48,206,698,274.00	94.95	45,839,704,469.00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	#DIV/0!	24,834,042,500.00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	#DIV/0!	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
76	Belanja Pegawai BOS		-	-	#DIV/0!	-
77	Belanja Pegawai BLUD		-	-	#DIV/0!	-
78	Belanja Barang dan Jasa		84,918,528,000.00	83,422,141,237.00	98.24	80,043,275,302.00
79	Belanja Barang		51,100,341,000.00	50,068,585,475.00	97.98	62,884,180,654.00
80	Belanja Jasa		21,487,413,000.00	21,141,301,809.00	98.39	8,109,157,054.00
81	Belanja Pemeliharaan		3,268,186,000.00	3,253,071,160.00	99.54	4,992,119,163.00
82	Belanja Perjalanan Dinas		2,908,903,000.00	2,854,887,793.00	98.14	3,819,653,831.00
83	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		6,153,685,000.00	6,104,295,000.00	99.20	238,164,600.00
84	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	#DIV/0!	-
85	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	#DIV/0!	-
86	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	#DIV/0!	-
87	Belanja Bunga		-	-	#DIV/0!	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (l KR)		-	-	#DIV/0!	-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Rukan Bank (l KRB)		-	-	#DIV/0!	-
92	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obliqasi)		-	-	#DIV/0!	-
93	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
94	Belanja Subsidi		-	-	#DIV/0!	-
95	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
96	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
97	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
98	Belanja Hibah		-	-	#DIV/0!	-
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
101	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
102	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Berbadan Hukum Indonesia		-	-	#DIV/0!	-
104	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	#DIV/0!	-
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	#DIV/0!	-
106	Belanja Bantuan Sosial		33,753,750,000.00	29,961,000,000.00	88.76	-
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		33,753,750,000.00	29,961,000,000.00	88.76	-
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarqa		-	-	#DIV/0!	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	#DIV/0!	-
111	Jumlah Belanja Operasi		216,691,082,000.00	206,593,322,309.00	95.34	198,237,027,935.00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
115	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		520,000,000.00	516,305,441.00	99.29	824,449,000.00
117	Belanja Modal Alat Besar		25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	-
119	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	#DIV/0!	-
120	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	#DIV/0!	7,615,000.00
121	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	#DIV/0!	-
122	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		330,000,000.00	327,930,441.00	99.37	674,904,000.00
123	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		-	-	#DIV/0!	-
124	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	#DIV/0!	11,800,000.00
125	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	#DIV/0!	-
126	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	#DIV/0!	-
127	Belanja Modal Komputer		165,000,000.00	163,375,000.00	99.02	130,130,000.00
128	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
129	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	#DIV/0!	-
130	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	#DIV/0!	-
131	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
132	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	#DIV/0!	-
133	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	#DIV/0!	-
134	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	#DIV/0!	-
135	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	#DIV/0!	-
136	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
137	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	#DIV/0!	-
138	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		185,000,000.00	184,353,000.00	99.65	-
139	Belanja Modal Gedung		185,000,000.00	184,353,000.00	99.65	-
140	Belanja Modal Monumen		-	-	#DIV/0!	-
141	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	#DIV/0!	-
142	Belanja Modal Tuqg Titik Kontrol/Pasti		-	-	#DIV/0!	-
143	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
144	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	#DIV/0!	-
145	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	#DIV/0!	-
146	Belanja Modal Instalasi		-	-	#DIV/0!	-
147	Belanja Modal Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
148	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	#DIV/0!	33,700,000.00
149	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-	#DIV/0!	33,700,000.00
150	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/		-	-	#DIV/0!	-
151	Belanja Modal Hewan		-	-	#DIV/0!	-
152	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	#DIV/0!	-
153	Belanja Modal Tanaman		-	-	#DIV/0!	-
154	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	#DIV/0!	-
155	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	#DIV/0!	-
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	#DIV/0!	-
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	#DIV/0!	24,880,000.00
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	#DIV/0!	24,880,000.00
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
160	Jumlah Belanja Modal		705,000,000.00	700,658,441.00	99.38	883,029,000.00
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA					
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
164	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
166						
167	BELANJA TRANSFER					
168	Belanja Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	#DIV/0!	-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	#DIV/0!	-
176	Jumlah Belanja Transfer		-	-	#DIV/0!	-
177						
178	JUMLAH BELANJA DAERAH		217,396,082,000.00	207,293,980,750.00	95.35	199,120,056,935.00
179						
180	SURPLUS/DEFISIT		(217,303,985,000.00)	(207,184,639,850.00)	95.34	(199,016,796,935.00)
181						
182	PEMI PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PEI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	#DIV/0!	-
185	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	#DIV/0!	-
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
189	Penghematan Belanja		-	-	#DIV/0!	-
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Tersesalkan		-	-	#DIV/0!	-
191	Sisa Dana Akiat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Peneluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
192	Sisa Belanja Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
194	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
211	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		-	-	#DIV/0!	-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	#DIV/0!	-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	#DIV/0!	-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Berqulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perunda		-	-	#DIV/0!	-
237	Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	#DIV/0!	-
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(217,303,985,000.00)	(207,184,639,850.00)	-	(199,016,796,935.00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





**DINAS SOSIAL
LAPORAN OPERASIONAL**
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	#DIV/0!
9	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		109,340,900.00	103,260,000.00	6,080,900	5.89
10	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	#DIV/0!
11	Retribusi Jasa Usaha - LO		109,340,900.00	103,260,000.00	6,080,900	5.89
12	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	#DIV/0!
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-	-	#DIV/0!
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-	-	#DIV/0!
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-	-	#DIV/0!
17	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan -		-	-	-	#DIV/0!
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
21	Hasil Keria Sama Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
22	Jasa Giro - LO		-	-	-	#DIV/0!
23	Hasil Pengelolaan Dana Beruair - LO		-	-	-	#DIV/0!
24	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	#DIV/0!
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		-	-	-	#DIV/0!
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap		-	-	-	#DIV/0!
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -		-	-	-	#DIV/0!
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	#DIV/0!
32	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	#DIV/0!
33	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	#DIV/0!
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		-	-	-	#DIV/0!
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Beruair - LO		-	-	-	#DIV/0!
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	#DIV/0!
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
39	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	#DIV/0!
40	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa - LO		-	-	-	#DIV/0!
41	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO		-	-	-	#DIV/0!
42	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		109.340.900.00	103.260.000.00	6.080.900.00	5.89
43	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
45	Dana Perimbangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
46	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	#DIV/0!
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	#DIV/0!
48	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	#DIV/0!
49	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
50	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	#DIV/0!
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
53	Pendapatan Hibah- LO		219,000,000.00	23,287,500.00	195,712,500	840.42
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		-	23,287,500.00	(23,287,500)	(100.00)
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	#DIV/0!
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam		-	-	-	#DIV/0!
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam		219,000,000.00	-	219,000,000	#DIV/0!
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO		-	-	-	#DIV/0!
59	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
60	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
62	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	#DIV/0!
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		219,000,000.00	23,287,500.00	195,712,500.00	840.42
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO		328,340,900.00	126,547,500.00	201,793,400.00	159.46
66						
67	BEBAN					
68	BEBAN OPERASIONAL					
69	Beban Pegawai		93,210,181,072.00	118,193,752,633.00	(24,983,571,561)	(21.14)
70	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		45,003,482,798.00	47,520,005,664.00	(2,516,522,866)	(5.30)
71	Beban Tambahan Penhasilan ASN		48,206,698,274.00	45,839,704,469.00	2,366,993,805	5.16
72	Tambahan Penhasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif		-	24,834,042,500.00	(24,834,042,500)	(100.00)
73	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	#DIV/0!
74	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	#DIV/0!
75	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	#DIV/0!
76	Beban Pegawai BOS		-	-	-	#DIV/0!
77	Beban Barang dan Jasa		81,831,807,668.04	79,808,009,204.60	2,023,798,463	2.54
78	Beban Barang		50,075,092,429.00	62,280,858,700.00	(12,205,766,271)	(19.60)
79	Beban Jasa		21,149,839,736.04	8,691,602,510.60	12,458,237,225	143.34
80	Beban Pemeliharaan		1,647,692,710.00	4,933,394,163.00	(3,285,701,453)	(66.60)
81	Beban Perjalanan Dinas		2,854,887,793.00	3,819,653,831.00	(964,766,038)	(25.26)
82	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Ditua/ Diberikan		6,104,295,000.00	82,500,000.00	6,021,795,000	7,299.15
83	Beban Barang dan Jasa BOP		-	-	-	#DIV/0!
84	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	#DIV/0!
85	Beban Bunga		-	-	-	#DIV/0!
86	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
87	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	#DIV/0!
88	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	#DIV/0!
89	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan		-	-	-	#DIV/0!
90	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	#DIV/0!
91	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	#DIV/0!
92	Beban Subsidi		-	-	-	#DIV/0!
93	Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-	#DIV/0!
94	Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-	#DIV/0!
95	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	#DIV/0!
96	Beban Subsidi kepada Kooperasi		-	-	-	#DIV/0!

NO	URAIAN	REF	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
96	Beban Hibah		42,640,000.00	55,879,600.00	(13,239,600)	(23.69)
97	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
98	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		42,640,000.00	-	42,640,000	#DIV/0!
99	Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-	#DIV/0!
100	Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-	#DIV/0!
101	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi		-	55,879,600.00	(55,879,600)	(100.00)
102	Beban Hibah Dana BOS		-	-	-	#DIV/0!
103	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	#DIV/0!
104	Beban Bantuan Sosial		29,961,000,000.00	99,785,000.00	29,861,215,000	29,925.55
105	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		29,961,000,000.00	-	29,961,000,000	#DIV/0!
106	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	#DIV/0!
107	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	99,785,000.00	(99,785,000)	(100.00)
108	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan		-	-	-	#DIV/0!
109	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	#DIV/0!
110	Beban Penyisihan Piutang Paik Daerah		-	-	-	#DIV/0!
111	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		-	-	-	#DIV/0!
112	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak Penjualan Aset Lain Lain Penjualan Aset Daerah yang		-	-	-	#DIV/0!
113			-	-	-	#DIV/0!
114	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
115	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil		-	-	-	#DIV/0!
116	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
	Beban Lain-Lain		36,243,400.00	36,300,000.00	(56,600)	(0.16)
	Beban Lain-Lain		36,243,400.00	36,300,000.00	(56,600)	(0.16)
117	Jumlah Beban Operasional		205,081,872,140.04	198,193,726,437.60	6,888,145,702	3.48
118						
119	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
120	Beban Peralatan dan Mesin		3,314,543,370.08	3,377,601,992.05	(63,058,622)	(1.87)
121	Beban Alat Besar		143,394,037.25	143,394,037.25	-	-
122	Beban Alat Anokutan		614,099,600.00	641,688,350.00	(27,588,750)	(4.30)
123	Beban Alat Benokel dan Alat Ukur		16,851,500.00	16,851,500.00	-	-
124	Beban Alat Pertanian		625,000.00	625,000.00	-	-
125	Beban Alat Kantor dan Rumah Tangga		1,797,697,927.34	1,832,467,164.80	(34,769,237)	(1.90)
126	Beban Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		7,915,000.00	7,460,000.00	455,000	6.10
127	Beban Alat Kedokteran dan Kesehatan		56,647,166.70	53,588,000.00	3,059,167	5.71
128	Beban Alat Laboratorium		8,337,000.00	8,555,750.00	(218,750)	(2.56)
129	Beban Penyusutan Alat Pensiataaan		-	-	-	#DIV/0!
130	Beban Komputer		668,801,138.79	672,972,190.00	(4,171,051)	(0.62)
131	Beban Alat Eksplorasi		-	-	-	#DIV/0!
132	Beban Alat Pengeboran		-	-	-	#DIV/0!
133	Beban Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	#DIV/0!
134	Beban Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	#DIV/0!
135	Beban Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	#DIV/0!
136	Beban Alat Peraga		175,000.00	-	175,000	#DIV/0!
137	Beban Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	#DIV/0!
138	Beban Rambu-rambu		-	-	-	#DIV/0!
139	Beban Peralatan Olahraga		-	-	-	#DIV/0!
140	Beban Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	#DIV/0!
141	Beban Gedung dan Bangunan		3,887,072,370.96	3,900,333,710.65	(13,261,340)	(0.34)
142	Beban Gedung		3,839,174,148.61	3,868,536,575.34	(29,362,427)	(0.76)
143	Beban Monumen		652,380.00	652,380.00	-	-
144	Beban Bangunan Menara		-	-	-	#DIV/0!
145	Beban Tuju Titik Kontrol/Pastl		47,245,842.35	31,144,755.31	16,101,087	51.70
146	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan		154,251,767.14	61,465,371.06	92,786,396	150.96
147	Beban Jalan dan Jembatan		77,125,883.57	77,125,884	-	#DIV/0!
148	Beban Bangunan Air		74,031,416.91	58,370,904.39	15,660,513	26.83
149	Beban Instalasi		333,333.33	333,333.33	-	-
150	Beban Jaringan		2,761,133.33	2,761,133.34	(0)	(0.00)
151	Beban Aset Tetap Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
152	Beban Bahan Perustakaan		-	-	-	#DIV/0!
153	Beban Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	#DIV/0!
154	Beban Hewan		-	-	-	#DIV/0!
155	Beban Biota Perairan		-	-	-	#DIV/0!
156	Beban Tanaman		-	-	-	#DIV/0!
157	Beban Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	#DIV/0!
158	Beban Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	#DIV/0!
159	Beban Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	#DIV/0!
160	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
161	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
162	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		22,129,400.00	47,520,600.00	(25,391,200)	(53.43)
163	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		22,129,400.00	47,520,600.00	(25,391,200)	(53.43)
164	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		7,377,996,908.18	7,386,921,673.76	20,646,587,576.16	279.50
165						
166	BEBAN TRANSFER					
167	Beban Bagi Hasil		-	-	-	#DIV/0!
168	Beban Bagi Hasil Paik Daerah Kepada Pemerintahan		-	-	-	#DIV/0!
169	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	#DIV/0!
170	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	#DIV/0!
171	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	#DIV/0!
172	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	#DIV/0!
173	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	#DIV/0!
174	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota		-	-	-	#DIV/0!
175	Jumlah Beban Transfer		-	-	-	#DIV/0!
176						
177	JUMLAH BEBAN		212,459,869,048.22	205,580,648,111.36	6,879,220,936.86	3.35
178						
179	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL		(212,131,528,148.22)	(205,454,100,611.36)	(6,677,427,536.86)	3.25
180						
181	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
182	SURPLUS NON OPERASIONAL					
183	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	#DIV/0!
184	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	#DIV/0!
185	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	#DIV/0!
186	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		-	-	-	#DIV/0!
187	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	#DIV/0!
188	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO		-	-	-	#DIV/0!
189	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	#DIV/0!
190	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan		-	-	-	#DIV/0!
191	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO		-	-	-	#DIV/0!
192	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-	-	#DIV/0!
193	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-	-	#DIV/0!
194	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-	-	#DIV/0!
195						
196	DEFISIT NON OPERASIONAL					
197	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	#DIV/0!
198	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	#DIV/0!
199	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	#DIV/0!
200	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	#DIV/0!
201	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO		-	-	-	#DIV/0!
202	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	#DIV/0!
203	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan		-	-	-	#DIV/0!
204	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO		-	-	-	#DIV/0!

NO	URAIAN	REF	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
205	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO				-	
206	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		24.537.567,50			
207	Jumlah Defisit Non Operasional		-	-	-	#DIV/0!
208						
209	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-	-	#DIV/0!
210						
211	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(212.131.528.148,22)	(205.454.100.611,36)	(6.677.427.536,86)	3,25
212						
213	POS LUAR BIASA					
214	PENDAPATAN LUAR BIASA					
215	Pendapatan Luar Biasa					
216	Pendapatan Luar Biasa					#DIV/0!
217	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA		-	-	-	#DIV/0!
218						
219	BEBAN TAK TERDUGA					
220	Beban Tak Terduga					
221	Beban Tak Terduga					#DIV/0!
222	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		-	-	-	#DIV/0!
223						
224	JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-	-	#DIV/0!
225						
226	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL		(212.131.528.148,22)	(205.454.100.611,36)	(6.677.427.536,86)	3,25

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





**NERACA KOMPARATIF
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

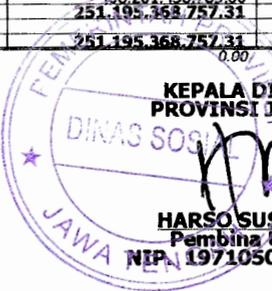
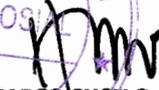
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2021	2020
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas			
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kaitansi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Investasi Jangka Pendek			
13	Investasi dalam Saham		-	-
14	Investasi dalam Deposito		-	-
15	Investasi dalam SUN		-	-
16	Investasi dalam SBI		-	-
17	Investasi dalam SPN		-	-
18	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
19	Piutang Pajak Daerah			
20	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
21	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
22	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
23	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
24	Piutang Pajak Rokok		-	-
36	Piutang Retribusi Daerah			
37	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
38	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
39	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
40	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
41	Piutang Bagian Laba atas Penvertaan Modal pada BUMN		-	-
42	Piutang Bagian Laba atas Penvertaan Modal pada BUMD		-	-
43	Piutang Bagian Laba yang Dibaikikan kepada Pemerintah Daerah		-	-
44	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
45	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
46	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak		-	-
47	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
48	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
49	Piutang Jasa Giro		-	-
50	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Beruqir		-	-
51	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
52	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan		-	-
53	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
54	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah		-	-
55	Piutang Pendanaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan		-	-
56	Piutang Pendanaan Denda Pajak Daerah		-	-
57	Piutang Pendanaan Denda Retribusi Daerah		-	-
58	Piutang Pendanaan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
59	Piutang Pendanaan dari Pengembalian		-	-
60	Piutang Pendanaan BLUD		-	-
61	Piutang Pendanaan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak		-	-
62	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
63	Piutang Pendanaan Hasil Pengelolaan Dana Beruqir		-	-
64	Piutang Pendanaan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
65	Piutang Pendanaan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
66	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
67	Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
68	Piutang Dana Perimbangan		-	-
69	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
70	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		-	-
71	Piutang Dana Keistimewaan		-	-
72	Piutang Dana Desa		-	-
73	Piutang Transfer Antar Daerah			
74	Piutang Bagi Hasil		-	-
75	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
76	Piutang Lainnya			
77	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
79	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anasuran		-	-
80	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
81	Jana Muka		-	-
82	Penvisihan Piutang			
83	Penvisihan Piutang Pendapatan		-	-
84	Penvisihan Piutang Lainnya		-	-
85	Beban Dibayar Dimuka		127.328.359,32	135.866.286,36
86	Beban Dibayar Dimuka		127.328.359,32	135.866.286,36
87	Persediaan		14.825.540,00	21.332.494,00
88	Barang Pakai Habis		14.825.540,00	21.332.494,00
89	Barang Tak Habis Pakai		-	-
90	Barang Bekas Dipakai		-	-
91	JUMLAH ASET LANCAR		142.153.899,32	157.198.780,36
92	INVESTASI JANGKA PANJANG			
94	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
95	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
96	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
97	Investasi dalam Obligasi		-	-
98	Investasi dalam Proyek Pembiayaan		-	-
99	Dana Beruqir		-	-
100	Investasi Jangka Panjang Permanen			
101	Penvertaan Modal		-	-
102	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
103	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			
104				

105	ASET TETAP		
106	Tanah	135.203.297.940,00	135.203.297.940,00
107	Tanah	135.203.297.940,00	135.203.297.940,00
108	Peralatan dan Mesin	48.427.716.708,00	48.899.843.320,00
109	Alat Besar	1.451.251.798,00	1.451.251.798,00
110	Alat Anokutan	16.817.098.411,00	16.188.168.048,00
111	Alat Benkel dan Alat Ukur	397.683.300,00	442.299.050,00
112	Alat Pertanian	15.485.000,00	38.485.000,00
113	Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.988.982.873,00	22.801.200.669,00
114	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	469.037.784,00	586.077.784,00
115	Alat Kedokteran dan Kesehatan	950.557.321,00	932.702.321,00
116	Alat Laboratorium	95.285.000,00	100.035.000,00
117	Alat Peralaksanaan	-	-
118	Komputer	5.948.075.221,00	6.295.573.650,00
119	Alat Eksplorasi	-	-
120	Alat Pengeboran	-	-
121	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
122	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
123	Alat Keselamatan Kerja	-	-
124	Alat Peraga	241.165.000,00	23.000.000,00
125	Peralatan Proses/Produksi	-	-
126	Pembu-ran	-	-
127	Peralatan Olahraga	53.095.000,00	71.050.000,00
128	Gedung dan Bangunan	192.247.148.431,00	191.144.143.931,00
129	Bangunan Gedung	189.524.520.831,00	189.549.550.431,00
130	Monumen	32.619.000,00	32.619.000,00
131	Bangunan Menara	-	-
132	Tuak Titik Kontrol/Pasti	2.690.008.500,00	1.561.874.500,00
133	Jalan, Inoasi, dan Jarioan	3.427.994.569,00	2.847.004.069,00
134	Jalan dan Jembatan	52.859.000,00	52.859.000,00
135	Bangunan Air	3.267.301.569,00	2.686.311.069,00
136	Instalasi	25.000.000,00	25.000.000,00
137	Jarioan	82.834.000,00	82.834.000,00
138	Aset Tetap Lainnya	1.053.970.900,00	1.163.504.100,00
139	Bahan Perpustakaan	418.871.600,00	482.999.800,00
140	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	635.099.300,00	680.504.300,00
141	Hewan	-	-
142	Biota Perairan	-	-
143	Tanamah	-	-
144	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
145	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
146	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
147	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
148	Akumulasi Penyusutan	(129.454.247.190,02)	(123.412.222.200,90)
149	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(42.240.729.573,59)	(40.140.061.306,50)
150	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(85.808.590.389,25)	(81.979.037.088,29)
151	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jarioan, dan Inoasi	(1.404.927.227,18)	(1.293.123.806,11)
152	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
153	JUMLAH ASET TETAP	250.905.881.357,98	255.845.571.159,10
154			
155	DANA CADANGAN		
156	Dana Cadangan	-	-
157	Dana Cadangan	-	-
158	JUMLAH DANA CADANGAN		
159			
160	ASET LAINNYA		
161	Taahian Janaka Pantiang	-	-
162	Taahian Penjualan Anosuran	-	-
163	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
164	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
165	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
166	Aset Tak Berwujud	112.650.500,00	519.580.500,00
167	Aset Tak Berwujud	112.650.500,00	519.580.500,00
168	Aset Lain-lain	3.079.307.382,00	3.987.248.160,00
169	Aset Lain-lain	3.079.307.382,00	3.987.248.160,00
170	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(90.521.100,00)	(475.321.700,00)
171	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(90.521.100,00)	(475.321.700,00)
172	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.954.103.281,99)	(3.843.840.759,00)
173	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.954.103.281,99)	(3.843.840.759,00)
174	JUMLAH ASET LAINNYA	147.333.500,01	187.666.201,00
175			
176	JUMLAH ASET	251.195.368.757,31	256.190.436.140,46
177			
178	KEWAJIBAN		
179	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
180	Utang Perhitungaan Pihak Ketiga		
181	Utang Japen	-	-
182	Utang Juran Jaminan Kesehatan	-	-
183	Utang Juran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-
184	Utang Juran Jaminan Kematian	-	-
185	Utang PPN Pusat	-	-
186	Utang PPN Pusat	-	-
187	Utang Japerum	-	-
188	Utang Juran Wajib Pegawai	-	-
189	Utang Pihak Ketiga Lainnya	-	-
190	Utang Bunga		
191	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	-	-
192	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	-	-
193	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
194	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
195	Utang Bunga kepada Masyarakat	-	-
196	Utang Bunga BLUD	-	-
197	Utang Pinjaman Janaka Pendek		
198	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	-	-
199	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
200	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-
201	Utang Pinjaman BLUD	-	-
202	Bagian Lancar Utang Janaka Pantiang		
203	Bagian Lancar Utang Janaka Pantiang dari Pemerintah Pusat	-	-
204	Bagian Lancar Utang Janaka Pantiang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-
205	Bagian Lancar Utang Janaka Pantiang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)	-	-
206	Bagian Lancar Utang Janaka Pantiang dari Masyarakat	-	-
207	Bagian Lancar Utang Janaka Pendek BLUD	-	-
208	Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya		
209	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	-	-
210	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-
211	Uang Muka Lelana Penjualan Aset Daerah	-	-

212	Utang Belanja		-	-
213	Utang Belanja Pegawai		-	-
214	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
215	Utang Belanja Bunga		-	-
216	Utang Belanja Subsidi		-	-
217	Utang Belanja Hibah		-	-
218	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
219	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
220	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
221	Utang Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi		-	-
222	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
223	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
224	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
225	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
226	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
227	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
228	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
229	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
230	Utang Transfer		-	-
231	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
232			-	-
233	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
234	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
235	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
236	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
237	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
238	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
239	Utang kepada LKB-BUMN		-	-
240	Utang kepada LKB-BUMD		-	-
241	Utang kepada LKB-Swasta		-	-
242	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
243	Utang kepada LKBB-BUMN		-	-
244	Utang kepada LKBB-BUMD		-	-
245	Utang kepada LKBB-Swasta		-	-
246	Utang kepada Masyarakat		-	-
247	Obligasi		-	-
248	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
249			-	-
250	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
251			-	-
252	EKUITAS		-	-
272	EKUITAS		(155.006.068.027,69)	57.173.639.205,46
273	Ekuitas		262.526.972.415,82	262.627.739.816,82
274	Surplus/Defisit-LO		(417.533.040.443,51)	(205.454.100.611,36)
275	Ekuitas SAL		-	-
276	Estimasi Pendapatan		-	-
277	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
278	Apropriasi Belanja		-	-
279	Apropriasi Peneluaran Pembiayaan		-	-
280	Estimasi Perubahan SAL		-	-
281	Surplus/Defisit-LRA		-	-
282	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		406.201.436.785,00	199.016.796.935,00
283	RK PPKD		406.201.436.785,00	199.016.796.935,00
284	JUMLAH EKUITAS		251.195.368.757,31	256.190.436.140,46
285			-	-
286	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		251.195.368.757,31	256.190.436.140,46

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

HARSO SUSILO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710509 199903 1 003



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021
 Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	Ekuitas Awal	256,190,436,140.46	262,407,239,816.82
2	Surplus/Defisit-LO	(212,078,939,832.15)	(205,454,100,611.36)
3	RK PPKD	207,184,639,850.00	199,016,796,935.00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(100,767,401.00)	220,500,000.00
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	1,143,338,346.00	1,997,564,136.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar	1,143,338,346.00	4,739,437,912.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar		(2,741,873,776.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(1,143,338,346.00)	(1,781,064,136.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(1,143,338,346.00)	(3,014,685,287.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		1,233,621,151.00
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(3,754,560,827.00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		20,000,000.00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		(20,000,000.00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	(3,754,560,827.00)	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	4,000,000.00

NO	URAIAN	2021	2020
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		4,000,000.00
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	3,653,793,426.00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	3,653,793,426.00	
4.13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai		-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa		-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	251,195,368,757.31	256,190,436,140.46
Ekuitas Neraca		251,195,368,757.31	256,190,436,140.46
Difference		0.00	0.00


**KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TENGAH**
HARSO SUSILO, ST, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710509 199903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
I	Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran..... i
II	Laporan Realisasi Anggaran SKPD..... ii
III	Laporan Realisasi Anggaran SKPD sesuai PP No.71 Th.2010..... vii
IV	Laporan Operasional SKPD..... xi
V	Neraca Komparatif SKPD..... xiv
VI	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD..... xvii
 Catatan atas Laporan Keuangan	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... 1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD..... 4
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD..... 5
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD..... 6
	2.1 Ekonomi Makro..... 6
	2.2 Kebijakan Keuangan..... 9
	2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD..... 12
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN..... 14
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD..... 14
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan..... 19
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 20
	4.1 Kebijakan Penyusuna dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD..... 20
	4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan..... 21
	4.3 Kebijakan Akuntansi Beban..... 21
	4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja..... 23
	4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan..... 24
	4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas..... 24
	4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang..... 25
	4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka..... 28
	4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi..... 28

4.10	Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	29
4.11	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah.....	30
4.12	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.....	44
4.13	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.....	44
4.14	Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	46
4.15	Kebijakan Akuntansi Ekuitas.....	48
4.16	Kebijakan Akuntansi Koreksi.....	48
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	51
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	51
5.1.1	Penjelasan Pos-Pos Pendapatan.....	51
5.1.2	Belanja.....	53
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	61
5.2.1	Aset.....	61
5.2.2	Kewajiban.....	95
5.2.3	Ekuitas.....	95
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	95
5.3.1	Pendapatan.....	96
5.3.2	Beban.....	100
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	116
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	119
BAB VII	PENUTUP.....	132
	Lampiran Tambahan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah.....	10
Tabel 3.1	: Proporsi APBD Dinas Sosial Tahun 2021.....	14
Tabel 3.2	: Proporsi APBD Dinas Sosial Tahun 2020.....	15
Tabel 3.3	: Realisasi Belanja Tahun 2021.....	16
Tabel 3.4	: Realisasi Belanja per Program.....	18
Tabel 4.1	: Perhitungan Penyusutan Aset Tetap.....	33
Tabel 6.1	: SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	120
Tabel 6.2	: SDM Berdasarkan Pangkat Golongan.....	121
Tabel 6.3	: SDM Berdasarkan Jabatan.....	121
Tabel 6.4	: Nama, Alamat, Kuota Panti dan Rumah Pelayanan Sosial.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 – 2021.....	7
Gambar 2.2	: Pertumbuhan ekonomi per Provinsi di Indonesia Tahun 2021.....	7
Gambar 2.3	: Laju Inflasi Bulanan Tahun 2020 -2021.....	8
Gambar 2.4	: Laju Nilai Rupiah Bulanan Tahun 2020-2021.....	8
Gambar 2.4	: Data IPM per Provinsi Tahun 2021.....	9
Gambar 3.1	: Proporsi APBD Dinas Sosial Tahun 2021.....	14
Gambar 3.2	: Proporsi APBD Dinas Sosial Tahun 2020.....	15
Gambar 3.3	: Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021.....	15
Gambar 3.4	: Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan 2021.....	16
Gambar 6.1	: Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	120
Gambar 6.2	: Sebaran lokasi Panti dan Rumah Pelayanan Sosial	129



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah yang bertindak Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan sesuai dengan standar. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan Laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelola. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.



(c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

(d) **Keseimbangan antar generasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- (a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan ekuitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a) **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan



anggaranannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

c) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen Laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan seperti kewajiban kontijensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;
- d. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015873 tanggal 11 November 2021 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
 - 5.1.7 Komponen-komponen Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VIII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran – besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi dan indeks pembangunan manusia. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia tercatat sebesar 3,07 % lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 2,07 %. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2021 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2021 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi 3,07% pada tahun 2021. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2021, diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2022. Bank Indonesia mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

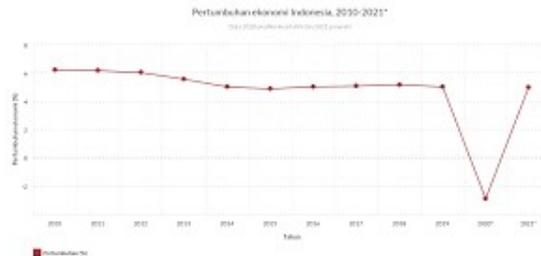
Perbaikan ekonomi domestik triwulan IV 2021 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2021 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2021, yakni tumbuh -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar 2.63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2021, dari -6,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor.

Di sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan pada triwulan IV 2021. LU yang terkait dengan kesehatan dan aktivitas *work from home* dan *school from home* tercatat tetap tumbuh positif dan melanjutkan perbaikan, seperti LU Informasi dan Komunikasi dan LU Jasa Kesehatan. LU Pertanian dan LU Pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan yang

berkontribusi cukup besar pada perekonomian terus melanjutkan perbaikan, meski masih berkontraksi.

Gambar 2.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 – 2021.

Gambar 2.1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 – 2021



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2021

Gambar 2.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Gambar 2.2
Pertumbuhan ekonomi per Provinsi di Indonesia

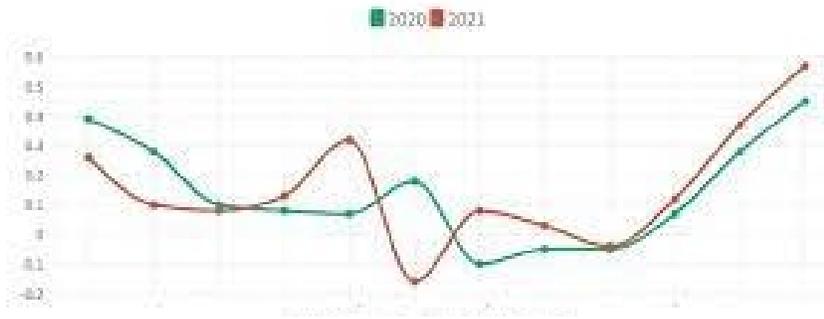


Sumber : Data Bank Indonesia 2021

Selanjutnya dari sisi inflasi, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahun kalender selama tahun 2021 sebesar 1,68 persen. Laju inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,72 persen. Nilai inflasi tahun 2021 bahkan terendah sejak tahun 1998. Ada 4 faktor penyebab turunnya inflasi tahun 2021. 1. Pasokan produksi yang memadai dengan permintaan pasar 2. Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam memenuhi

ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan 3. Nilai tukar rupiah yang bergerak stabil sepanjang 2021. 4. Harga sejumlah komoditas masih terjaga di nilai yang wajar. Gambar 2.2 menunjukkan data komparasi laju inflasi bulanan tahun 2020 - 2021.

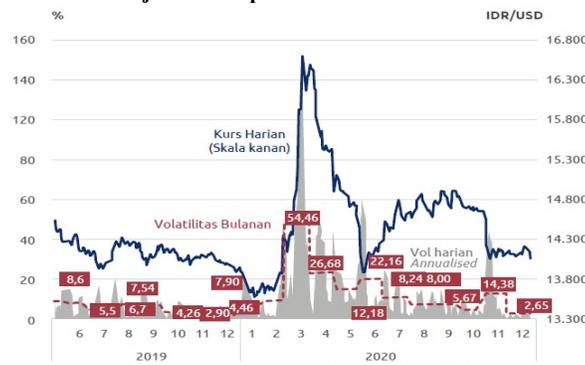
Gambar 2.3
Laju inflasi bulanan Tahun 2020- 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Nilai tukar rupiah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 13.948,- mengalami kenaikan dibanding nilai tukar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 13.865,- Hal ini disebabkan fundamental ekonomi Indonesia yang turun tercermin dari perkiraan pertumbuhan ekonomi yang akan diperkirakan berada di kisaran 2,07 persen. Kemudian tingkat inflasi Indonesia terjaga pada kisaran 1,68 persen dan defisit transaksi berjalan (CAD) berada di 2,5-3 persen dari PDB. Bekerjanya mekanisme pasar dengan baik juga membantu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap dollar. Selain itu efek dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta Bank Indonesia yang berkomitmen menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah secara mekanisme pasar dan fundamental turut membantu pengutan rupiah. Gambar 2.3 menunjukkan pergerakan nilai laju rupiah harian dan bulanan pada tahun 2020 - 2021

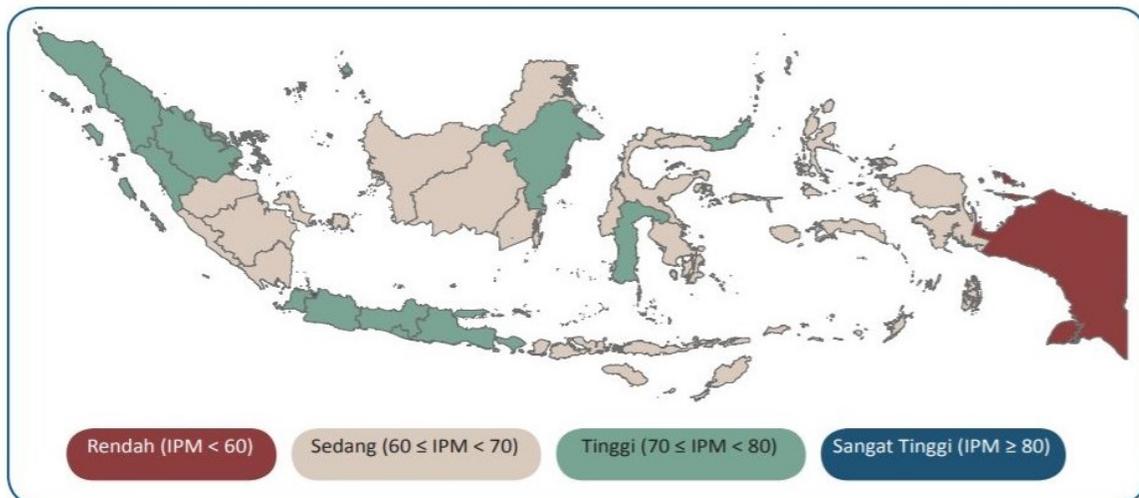
Gambar 2.4
Laju Nilai Rupiah Tahun 2020 – 2021



Sumber : Data Bank Indonesia 2021

Angka indeks pembangunan manusia sebesar 71,92. Angka ini membaik 0,53 persen dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar 71,39. Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat. perbaikan kualitas pendidikan tercermin dari angka harapan lama sekolah yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 12,95 tahun, dari tahun sebelumnya sebesar 12,91 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun atau minimal jenjang Diploma I. Tak hanya itu, rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 8,34 tahun atau lebih lama 0,17 tahun dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,17 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun atau setara hingga kelas IX. Dari sisi daya beli, tercatat pengeluaran per kapita mengalami peningkatan sebesar Rp 240.000 di tahun lalu. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat tercatat sebesar Rp 11,3 juta per tahun. Gambar 2.4 menunjukkan tingkat indeks pembangunan manusia per provinsi tahun 2021

Gambar 2.5
Data IPM per Provinsi tahun 2021



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

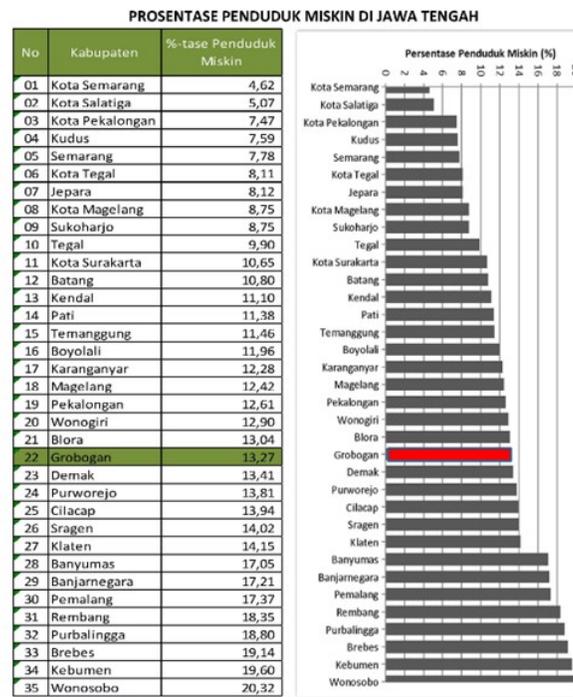
Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Kebijakan keuangan ini mengacu pada kebijakan keuangan daerah yang merupakan bagian dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan yang diwujudkan



dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Masih tingginya angka kemiskinan merupakan permasalahan utama yang dihadapi hingga saat ini. Dinas Sosial secara khusus berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,74 juta orang (10,80 persen), berkurang sebesar 160 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 3,90 juta orang (11,32 persen). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial guna menjawab isu strategis tersebut antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembangunan jejaring kemitraan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu keluar dari garis kemiskinan. Tabel 2.1 di bawah ini menunjukkan prosentase jumlah penduduk miskin per Kab/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Prosentase jumlah penduduk miskin per Kab/Kota di Jawa Tengah



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2021



2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, melalui:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;
- c. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Kebijakan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kab/Kota.
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 meliputi:
 - Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan.
 - Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah.
 - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar.
 - Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah.
 - Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana.
 - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.



- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
- f. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kab/Kota melalui Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa.

2.2.3. Arah Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah di arahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*);
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- d. Membentuk dana cadangan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :

- 2.3.1.1 Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2.3.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana Panti Sosial sehingga mampu melindungi dan mengembalikan fungsi sosial masyarakat Penyandang Cacat.
- 2.3.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial dan penanaman sikap kerelawan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
- 2.3.1.4 Meningkatkan keberdayaan Lembaga-lembaga Sosial dan Organisasi Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan.
- 2.3.1.5 Meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi Bencana baik Bencana Alam dan Bencana Sosial secara cepat dan tepat serta mewujudkan dan memulihkan fungsi sosial bagi para Korban Bencana.

2.3.2 Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan adalah bahwa :

- 2.3.2.1 Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten dan Kota
- 2.3.2.2 Adanya partisipasi dari Kabupaten/Kota di dalam ikut menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.



- 2.3.2.3 Di dalam penanganan permasalahan yang sifatnya tidak dapat dikendalikan (Bencana Alam dan Bencana Sosial) didukung penuh baik oleh instansi terkait maupun oleh masyarakat.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN

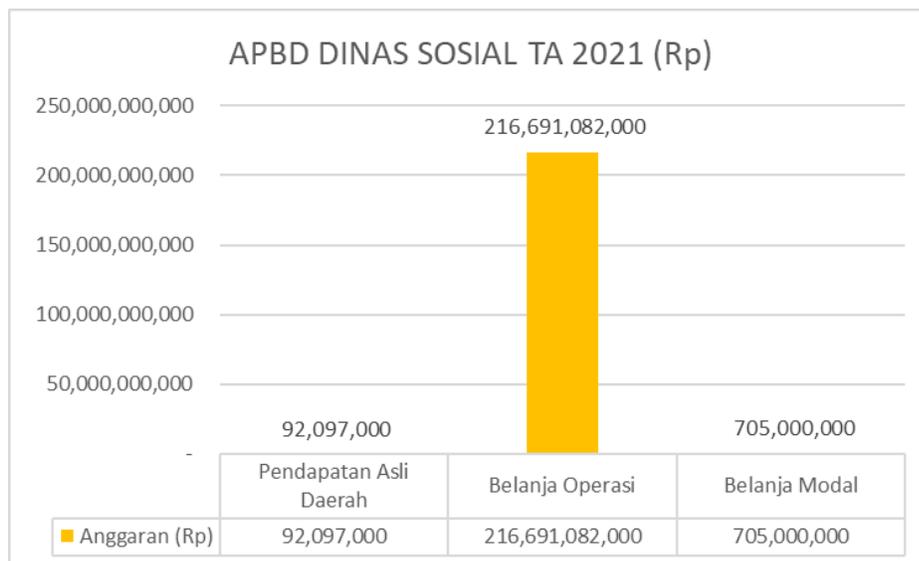
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 217.303.985.000,- atau mengalami penurunan sebesar 6,00% dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 205.309.176.000,-. Gambar 3.1 dan Tabel 3.1 menunjukkan proporsi APBD Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sedangkan Gambar 3.2 dan Tabel 3.2 menunjukkan proporsi APBD Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 3.1
Proporsi APBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (dalam Rp)

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	92.097.000,00
2.	Belanja Operasi	216.691.082.000,00
3.	Belanja Modal	705.000.000,00
	Surplus/(Defisit)	(217.303.985.000,00)

Gambar 3.1
Proporsi APBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021



Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.2
Proporsi APBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (dalam Rp)

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	60.000.000,00
2.	Belanja Operasi	204.468.836.000,00
3.	Belanja Modal	900.340.000,00
	Surplus/(Defisit)	(205.309.176.000,00)

Gambar 3.2
Proporsi APBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (dalam Rp)



Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Realisasi Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 109.340.000,00 dan Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 207.293.980.750,00. Data Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 dapat dirinci sebagaimana terangkum pada tabel 3.3 dan gambar 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	92.097.000	109.340.900	118.72%
	- <i>Pendapatan Asli Daerah</i>	92.097.000	109.340.900	118.72%
2.	Belanja	217.396.082.000	207.293.980.750	95.35%
	- <i>Belanja Operasi</i>	216.691.082.000	206.593.322.309	95.34%
	- <i>Belanja Modal</i>	705.000.000	700.658.441	99.38%
	Surplus/(Defisit)	(217.303.985.000)	(207.184.639.850)	95.34%

Gambar 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah TA 2021



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 92.097.000,- sedangkan realisasi dapat tercapai sebesar Rp. 109.340.900,- atau tercapai 118,72 % dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020, realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.080.000,- atau 6% dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103.260.000,-. Realisasi Pendapatan Dinas Sosial tersebut

merupakan bagian dari kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Rincian Objek Pendapatan Retribusi Daerah. Data komparasi atau perbandingan capaian target pendapatan 2020 dan 2021 dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4

Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah TA 2021



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.2. Realisasi Belanja Daerah sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 207.293.980.750,00 atau 95,35 %, dari total anggaran belanja sebesar Rp. 217.396.082.000,- dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 10.102.101.250,- atau 4,65 % yang dirinci dalam program/kegiatan sebagaimana pada tabel 3.4 berikut:



Tabel 3.4
KHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

No	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	REALISASI		KETERANGAN (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Sosial	217.396.082.000	207.293.980.750	100,00	95,35	
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	123.419.407.000	118.301.580.724	100,00	95,85	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.540.000	441.421.500	100,00	99,52	
	Administrasi Keuangan	99.561.504.000	94.744.168.258	100,00	95,16	Sejumlah jabatan struktural belum terisi sampai pada saat pelantikan tanggal 30 Desember 2021
	Administrasi Umum	23.414.363.000	23.115.990.966	100,00	98,73	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.786.747.000	5.744.447.081	100,00	99,27	
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	283.355.000	273.344.600	100,00	96,47	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	5.503.392.000	5.471.102.481	100,00	99,41	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	16.760.000	16.737.225	100,00	99,86	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	16.760.000	16.737.225	100,00	99,86	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	51.047.063.000	49.946.958.121	100,00	97,84	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	17.837.116.000	17.444.709.500	100,00	97,80	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	14.597.706.000	14.352.808.675	100,00	98,32	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	13.007.947.000	12.841.202.946	100,00	98,72	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2.275.336.000	2.271.319.000	100,00	99,82	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	3.328.958.000	3.036.918.000	100,00	91,23	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	35.742.462.000	31.906.410.000	100,00	89,27	
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	97.950.000	97.945.000	100,00	99,99	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	35.644.512.000	31.808.465.000	100,00	89,24	Dalam pelaksanaan KJS, selain dikarenakan KPM pindah alamat atau meninggal dunia, penerima bansos uang dalam bentuk KJS telah menerima bantuan lain dari Pemerintah Pusat sehingga sesuai juknis yang berlaku, KPM tidak berhak lagi untuk menerima KJS. Selain itu, dari hasil monitoring dan evaluasi, beberapa KPM telah mampu / produktif untuk mencukupi kebutuhannya sendiri
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.189.972.000	1.184.526.799	100,00	99,54	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.189.972.000	1.184.526.799	100,00	99,54	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	193.671.000	193.320.800	100,00	99,82	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	193.671.000	193.320.800	100,00	99,82	



3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Adanya efisiensi dan negosiasi dalam proses pengadaan barang/jasa, namun tetap dengan capaian fisik 100%;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Kegiatan yang sifatnya *unpredictable* atau tidak dapat diprediksi kejadiannya seperti bencana alam dan bencana sosial
- d. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrua. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perubahan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- b. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- d. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- e. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- f. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.



4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.1 Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.2 Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.



b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian



bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
- c. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.



- d. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
- e. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
- f. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- g. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
- c. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
- 2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.



3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
 - a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
 - b. Kas Pengelola Daerah yang Dikelola SKPD

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
- c. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
- d. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak



- Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
- e. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - f. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - g. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
 - h. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
 - i. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
 - j. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



k. Kriteria pengakuan piutang pajak :

1. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

l. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.

m. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

n. Penghentian pengakuan piutang

o. Penyisihan piutang tidak tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

p. Penghentian pengakuan piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

q. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

r. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu



4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

- a. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
- b. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.
- c. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
- d. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
- e. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
- f. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi Jangka Pendek :
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 2. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
 3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
 5. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.



6. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 7. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 8. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Panjang :
1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
 2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
 3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
 4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
- c. Metode penilaian investasi pemerintah :
1. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 2. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Barang persediaan terdiri dari :
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;



2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kemasyarakat;
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
 - d. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
 - e. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
 - f. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun dan khusus untuk pencatatan persediaan secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

- a. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.
- b. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :
 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.



- e. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- f. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
- g. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- h. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
- i. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- j. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
- k. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
- l. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- m. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
- n. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- o. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat ditribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- p. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



- q. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
- r. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).
- s. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
- t. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
- u. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- v. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
- w. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- x. Penyusutan aset

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai



yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Tabel 4.1
Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2		Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	3
						≥75%	5
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	8	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	2
						≥75%	4



Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	05	Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	1
						≥75%	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	2
						≥75%	4
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	1
						≥75%	2
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	3
						50% ≤ sd <75%	6
						≥75%	9
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
						25% ≤ sd <50%	1
						50% ≤ sd <75%	2
						≥75%	5
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	11		Alat Ukur	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	12		Alat Pengolahan	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	14		Alat Kantor	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	16		Komputer	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	1
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	18		Alat Studio	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	19		Alat Komunikasi	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	20		Peralatan Pemancar	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	5
1	3	2	21		Alat Kedokteran	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	22		Alat Kesehatan	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	2
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	28		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	<25%	0



Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
				(BATAM)			
						25% ≤ sd < 50%	2
						50% ≤ sd < 75%	4
						≥ 75%	5
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	1
						50% ≤ sd < 75%	2
						≥ 75%	3
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	3
						50% ≤ sd < 75%	5
						≥ 75%	7
1	3	2	31	Senjata Api dan Alat Keamanan	10	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	1
						50% ≤ sd < 75%	2
						≥ 75%	4
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	4	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	0
						50% ≤ sd < 75%	1
						≥ 75%	1
1	3	2	34	Senjata Sinar	5	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	0
						50% ≤ sd < 75%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan			
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
					Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	3	02		Bangunan Gd. Tempat Tinggal			
					Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1



Kode Akun				Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
						50% ≤ sd < 75%	2
						≥ 75%	5
1	3	3	03	Menara dan Monumen			
				Permanen	50	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	5
						50% ≤ sd < 75%	10
						≥ 75%	15
				Semi Permanen	25	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	1
						50% ≤ sd < 75%	3
						≥ 75%	7
				Darurat	10	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	1
						50% ≤ sd < 75%	2
						≥ 75%	5
1	3	3	4	Rambu-Rambu	20	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	1
						50% ≤ sd < 75%	3
						≥ 75%	4
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	4	01	Jalan	10	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	1
						50% ≤ sd < 75%	2
						≥ 75%	5
1	3	4	02	Jembatan	50	< 25%	0
						25% ≤ sd < 50%	5



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	50	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	50	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	25	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	3
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	3
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	7
							≥ 75%	10
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	7
							≥ 75%	10
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	15
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	18		Instalasi Gas	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	3
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	2
							50% ≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	21		Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	22		Jaringan Telepon	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	2
							50% ≤ sd <75%	5
							≥75%	10



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	4	23		Jaringan Gas	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	2
							50% ≤ sd <75%	7
							≥75%	10

- y. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- z. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
- aa. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
- c. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
- d. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik



- b. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah *Goodwill*, hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
- c. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- d. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari:
1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat,
 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- f. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud tersebut.
- g. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
- h. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
- i. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :
- $$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$
- Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
 - Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
- j. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
- k. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.



- l. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- m. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- n. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancer utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
- c. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- d. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- e. Kewajiban kontinjensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia.
- f. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.
- g. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Utang Pihak Ketiga



Pada saat pemerintah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

b) Utang bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Nilai Pungutan/Potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

f) Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

g) Utang transfer

Utang transfer DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar bagian pendapatan entitas penerima yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan. Sedangkan utang selain DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan jumlah yang telah disalurkan.

2. Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri

a) Utang lembaga perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b) Utang non perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari.



- h. Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- a. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
- b. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
 - Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
 - Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
- c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
- d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
- e. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
- f. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi

- a. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
- b. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
 - 1) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - 2) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)



a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

b) Belanja dan Beban

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

c) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

d) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

e) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi



- kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
- f) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembedulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 92.097.000,- sedangkan total realisasi sebesar Rp. 109.340.900,- atau 118,72% dari target, mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.080.900,- atau 6% dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103.260.000,- dengan rincian sebagai berikut:

	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi			
Pendapatan Asli daerah	92.097.000	109.340.900	118,72	103.260.000	6.080.900
Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-
Jumlah	92.097.000	109.340.900	118,72	103.260.000	6.080.900

Pendapatan melebihi target dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengintensifkan aset yang disewakan kepada pihak ketiga dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Sedangkan sewa Kamar pada Wisma Kartini di Tawangmangu Karanganyar, sewa lahan di Kab Jepara dan Kota Pekalongan melebihi target dari yang direncanakan

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 103.260.000,- atau 172,10 % dari target Rp 60.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 86.532.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2021		%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi			
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	92.097.000	109.340.900	118,72	103.260.000	6.080.900
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
Jumlah	92.097.000	109.340.900	118,72	103.260.000	6.080.900

Pendapatan melebihi target dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengintensifkan aset yang disewakan kepada pihak ketiga dapat berjalan sesuai dengan



yang telah ditargetkan. Sedangkan sewa Kamar pada Wisma Kartini di Tawangmangu Karanganyar, sewa lahan di Kab Jepara dan Kota Pekalongan melebihi target dari yang direncanakan

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 103.260.000,- atau 172,10 % dari target Rp 60.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 86.532.000 dengan rincian sebagai berikut:

	2021		%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.097.000	90.260.000	176,63	90.260.000	
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	8.900.000	13.000.000	146,07	9.600.000	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	
Jumlah	60.000.000	103.260.000	172,10	103.260.000	

Pendapatan melebihi target dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan aset yang disewakan kepada pihak ketiga dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Sedangkan sewa Kamar pada Wisma Kartini di Tawangmangu Karanganyar, sewa lahan di Kab Jepara dan Kota Pekalongan melebihi target dari yang direncanakan

5.1.1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,- atau ~ % dari target Rp -,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp - dengan rincian sebagai berikut

	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Lain-lain SKPD	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-



5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 206.593.322.309,- atau 95,34 % dari anggaran Rp. 216.691.082.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 197.967.499.714,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 8.625.822.595,- atau 4,18% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	98.018.804.000	93.210.181.072	95,09	118.156.637.633	(24.946.456.561)
Belanja Barang dan Jasa	84.918.528.000	83.422.141.237	98,24	79.810.862.081	3.611.279.156
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah					
Belanja Bantuan Sosial	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76		29.961.000.000
Jumlah	216.691.082.000	206.593.322.309	95,34	197.967.499.714	8.625.822.595

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 93.210.181.072,- atau 95,09 % dari anggaran Rp. 98.018.804.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 93.359.710.133,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 149.529.061 atau (0,16) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	47.245.783.000	45.003.482.798	95,25	47.520.005.664	(2.516.522.866)
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.773.021.000	48.206.698.274	94,95	45.839.704.469	2.366.993.805
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					
7 Belanja Pegawai BOS					
8 Belanja Pegawai BLUD					
Jumlah	98.018.804.000	93.210.181.072	95,09	93.359.710.133	(149.529.061)

Pada Belanja Pegawai tidak dapat terealisasi seluruhnya dikarenakan banyak ASN yang memasuki masa Purna Tugas dan banyaknya jabatan struktural belum terisi sampai pada pelantikan tanggal 30 Desember 2021.



5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp 47.245.783.000 dengan realisasi sebesar Rp 45.003.482.798 atau 95,25 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 47.520.005.664 mengalami **penurunan** sebesar Rp (2.516.522.866) atau (5,59) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	
1	Belanja Gaji Pokok ASN	34.380.567.000	33.831.448.686	98,40	36.160.195.221	(2.328.746.535)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.201.910.000	3.013.706.674	94,12	3.176.417.058	(162.710.384)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.297.980.000	949.750.000	73,17	917.910.000	31.840.000
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.082.106.000	906.720.000	83,79	905.735.000	985.000
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.145.528.000	1.066.815.000	93,13	1.194.485.000	(127.670.000)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.796.424.000	1.760.819.880	98,02	1.603.523.640	157.296.240
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	305.121.000	161.498.514	52,93	165.893.496	(4.394.982)
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	626.000	435.267	69,53	423.737	11.530
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	3.705.467.000	3.035.153.730	81,91	3.099.035.411	(63.881.681)
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	82.514.000	69.283.764	83,97	74.096.775	(4.813.011)
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	247.540.000	207.851.283	83,97	222.290.326	(14.439.043)
12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					
	Jumlah	47.245.783.000	45.003.482.798	95,25	47.520.005.664	(2.516.522.866)

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp 50.773.021.000 dengan realisasi sebesar Rp 48.206.698.274 atau 94,95 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 45.839.704.469 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.366.993.805 atau 4,91% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.265.947.000	43.017.204.734	97,18	45.839.704.469	(2.822.499.735)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.507.074.000	5.189.493.540	79,75		5.189.493.540
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					
	Jumlah	50.773.021.000	48.206.698.274	94,95	45.839.704.469	2.366.993.805



5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 83.422.141.237

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 84.918.528.000 dengan realisasi sebesar Rp 83.422.141.237 atau 98,24 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 80.043.275.302 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.378.865.935 atau 4,05% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Barang	51.100.341.000	50.068.585.475	97,98	62.884.180.654	(12.815.595.179)
2 Belanja Jasa	21.487.413.000	21.141.301.809	98,39	8.109.157.054	13.032.144.755
3 Belanja Pemeliharaan	3.268.186.000	3.253.071.160	99,54	4.992.119.163	(1.739.048.003)
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.908.903.000	2.854.887.793	98,14	3.819.653.831	(964.766.038)
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.153.685.000	6.104.295.000	99,20	238.164.600	5.866.130.400
6 Belanja Barang dan Jasa BOP					
7 Belanja Barang dan Jasa BOS					
8 Belanja Barang dan Jasa BLUD					
Jumlah	84.918.528.000	83.422.141.237	98,24	80.043.275.302	3.378.865.935

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang Rp 32.554.600.579,-

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 32.673.570.000 dengan realisasi sebesar Rp 32.554.600.579 atau 99,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 12.379.900.478 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 20.174.700.101 atau 61,97 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis	32.673.570.000	32.554.600.579	99,64	12.379.900.478	20.174.700.101
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai					
3 Belanja Barang Bekas Dipakai					
Jumlah	32.673.570.000	32.554.600.579	99,64	12.379.900.478	20.174.700.101

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa Rp 21.140.301.809,-

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp 21.487.413.000 dengan realisasi sebesar Rp 21.140.301.809 atau 98,38 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 45.317.030.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 13.067.806.255 atau 61,81 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	20.334.242.000	20.004.682.571	98,38	6.987.731.854	13.016.950.717
2 Belanja luran Jaminan/Asuransi	826.100.000	810.149.738	98,07	722.785.200	87.364.538
3 Belanja Sewa Tanah					
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.000.000	55.948.500	99,95	45.010.000.000	
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000	1.000.000	100	307.030.000	(306.030.000)
6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi					
7 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					



	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
8 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	114.000.000	113.450.000	99,52	0	113.450.000
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					
9 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					
10 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					
11 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	156.071.000	156.071.000	100	0	156.071.000
12 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					
13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					
Jumlah	21.487.413.000	21.140.301.809	98,38	45.317.030.000	13.067.806.255

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan Rp 3.104.744.860,-

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 3.119.676.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.104.744.860 atau 99,54 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.721.545.263 mengalami **penurunan** sebesar Rp (1.616.801.303) atau (52,07) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Pemeliharaan Tanah					
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455.525.000	453.940.900	99,65	1.155.353.063	(701.413.063)
3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.656.551.000	2.643.203.960	99,50	3.510.612.200	(867.408.240)
4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.600.000	7.600.000	100	55.580.000	(47.980.000)
Jumlah	3.119.676.000	3.104.744.860	99,54	4.721.545.263	(1.616.801.303)

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas Rp 2.854.887.793,-

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 2.908.903.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.854.887.793 atau 98,14 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.819.653.831 mengalami **penurunan** sebesar Rp (964.766.038) atau (33,79)% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.856.000	2.809.547.793	98,14	3.691.950.621	(882.402.828)
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	46.047.000	45.340.000	98,46	127.703.210	(82.363.210)
Jumlah	2.908.903.000	2.854.887.793	98,14	3.819.653.831	(964.766.038)



5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 565.185.000,-

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp 570.785.000 dengan realisasi sebesar Rp 565.185.000 atau 99,02 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 76.500.000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 488.685.000 atau 86,46% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	570.785.000	565.185.000	99,02	76.500.000	488.685.000
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
Jumlah	570.785.000	565.185.000	99,02	76.500.000	488.685.000

5.1.2.1.2.6. Belanja Bantuan Sosial Rp 29.961.000.000,-

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp 33.753.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 29.961.000.000 atau 88,76 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 0 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 29.961.000.000 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	0	29.961.000.000
2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					
3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					
4 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					
Jumlah	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	0	29.961.000.000

5.1.2.1.2.6.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp 29.961.000.000

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp 33.753.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 29.961.000.000 atau 88,76 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 0 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 29.961.000.000 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	0	29.961.000.000
2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					
Jumlah	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	0	29.961.000.000

Belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu merupakan implementasi dari pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diberikan kepada 12.764 Penerima Manfaat (PM) dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan sesuai Juknis yang berlaku.



5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp 700.658.441,-

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 705.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 700.658.441 atau 99,47 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 824.449.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp (123.790.559) atau (17,66)% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Tanah					
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.000.000	516.305.441	99,29	824.449.000	(308.143.559)
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000	184.353.000	99,65	0	184.353.000
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
6 Belanja Modal Aset Lainnya					
Jumlah	705.000.000	700.658.441	99,47	824.449.000	(123.790.559)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 516.305.441,-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 520.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 516.305.441 atau 99,46 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 805.034.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp (288.728.559) atau (55,92) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Besar	25.000.000	25.000.000	100	0	25.000.000
2 Belanja Modal Alat Angkutan					
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					
4 Belanja Modal Alat Pertanian					
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.000.000	327.930.441	99,37	674.904.000	(346.973.559)
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					
8 Belanja Modal Alat Laboratorium					
9 Belanja Modal Komputer	165.000.000	163.375.000	99,02	130.130.000	33.245.000
10 Belanja Modal Alat Eksplorasi					
11 Belanja Modal Alat Pengeboran					
12 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					
13 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi					
14 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					
15 Belanja Modal Alat Peraga					
16 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi					
17 Belanja Modal Rambu-rambu					
18 Belanja Modal Peralatan Olahraga					
19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS					
Jumlah	520.000.000	516.305.441	99,46	805.034.000	(288.728.559)



5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Besar Rp 25.000.000,-

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 25.000.000 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 0 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 25.000.000 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Besar Darat					
2 Belanja Modal Alat Besar Apung					
3 Belanja Modal Alat Bantu	25.000.000	25.000.000	100	0	25.000.000
Jumlah	25.000.000	25.000.000	100	0	25.000.000

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 327.930.441,-

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 330.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 327.930.441 atau 99,3 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 674.904.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp (346.973.559) atau 1,06 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Kantor	40.500.000	40.177.590	99,20	25.300.000	14.877.590
2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	289.500.000	287.752.851	99,40	649.604.000	(361.851.149)
3 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					
Jumlah	330.000.000	327.930.441	99,3	674.904.000	(346.973.559)

5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Komputer Rp 163.375.000,-

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 165.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 163.375.000 atau 99,02 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 130.130.000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 33.245.000 atau 20,34 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000	163.375.000	99,02	130.130.000	33.245.000
2 Belanja Modal Peralatan Komputer					
Jumlah	165.000.000	163.375.000	99,02	130.130.000	33.245.000



5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 184.353.000,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 185.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 184.353.000 atau 99,65 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 0 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 184.353.000 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	185.000.000	184.353.000	99,65	0	184.353.000
2 Belanja Modal Monumen					
3 Belanja Modal Bangunan Menara					
4 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					
Jumlah	185.000.000	184.353.000	99,65	0	184.353.000

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp 184.353.000,-

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp 185.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 184.353.000 atau 99,65 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 184.353.000 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp) 100	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	185.000.000	184.353.000	99,65	0	184.353.000
Jumlah	185.000.000	184.353.000	99,65	0	184.353.000

5.1.2.2.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 33.700.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 33.700.000 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan				33.700.000	33.700.000
2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga					
3 Belanja Modal Hewan					
4 Belanja Modal Biota Perairan					
5 Belanja Modal Tanaman					
6 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya					
7 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					
8 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					
9 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS					
Jumlah				33.700.000	33.700.000



5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp 0 dengan realisasi sebesar Rp 0 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 33.700.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 33.700.000 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak				33.700.000	33.700.000
2 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro					
3 Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya					
4 Belanja Modal Musik					
5 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Material) Lainnya"					
6 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita					
7 Belanja Modal Tarscalt					
Jumlah				33.700.000	33.700.000

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp 0 dengan realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 24.880.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 24.880.000 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				24.880.000	24.880.000
Jumlah				24.880.000	24.880.000

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 251.195.368.757.31

Total Aset sebesar Rp 251.195.368.757.31 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 256.190.436.140.46 mengalami kenaikan/penurunan* sebesar Rp (4.995.067.383.15) atau 102 %. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Aset Lancar	142.153.899.32	157.198.780.36
2 Investasi Jangka Panjang		
3 Aset Tetap	250.905.881.357.98	255.845.571.159.10
4 Dana Cadangan		
5 Aset Lainnya	147.333.500.01	187.666.201.00
Jumlah	251.195.368.757.31	256.190.436.140.46



5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 142.153.899.32

Aset Lancar sebesar Rp 142.153.899.32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 157.198.780.36 mengalami **penurunan** sebesar Rp (15.044.881.04) atau 111 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas		
2 Investasi Jangka Pendek		
3 Piutang Pajak Daerah		
4 Piutang Retribusi Daerah		
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
8 Piutang Transfer Antar Daerah		
9 Piutang Lainnya		
10 Penyisihan Piutang		
11 Beban Dibayar Dimuka	127.328.359.32	135.866.286.36
12 Persediaan	14.825.540.00	21.332.494.00
Jumlah	142.153.899.32	157.198.780.36

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp 127.328.359.32

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 127.328.359.32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 135.866.286.36 mengalami **penurunan** sebesar Rp (8.537.927.04) atau 107 % dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	127.328.359.32	135.866.286.36
Jumlah	127.328.359.32	135.866.286.36

5.2.1.1.2 Persediaan Rp 14.825.540.00

Persediaan sebesar Rp 14.825.540.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 21.332.494.00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp (6.506.954) atau 144% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	14.825.540.00	21.332.494.00
2 Barang Tak Habis Pakai		
3 Barang Bekas Pakai		
Jumlah	14.825.540.00	21.332.494.00

➤ pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No.	Uraian	SALDO AWAL Tahun 2021		SALDO AKHIR PERIODE 2021	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga
1	2		3		17
1	1.1.7.01.01 BAHAN	-	-	-	-
2	1.1.7.01.02 SUKU CADANG	-	-	-	-
3	1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	1,991	13,970,000.00	961	7,910,149.00
4	1.1.7.01.04 OBAT-OBATAN	7,860	7,362,494.00	8,611	6,915,391.00
5	1.1.7.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	-	-	-	-
6	1.1.7.01.06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-
7	1.1.7.01.07 NATURA DAN PAKAN	-	-	-	-
8	1.1.7.01.08 PERSEDIAAN PENELITIAN	-	-	-	-
9	1.1.7.01.09 PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-
10	1.1.7.02.01 KOMPONEN	-	-	-	-
11	1.1.7.02.02 P I P A	-	-	-	-
12	1.1.7.03.01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS	-	-	-	-
		9,851	21,332,494.00	9,572	14,825,540.00



5.2.1.1.2.1. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 7.910.149,-

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp 7.910.149, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 13.970.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp (6.059.851) atau 177 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Tulis Kantor	3.310.149	5.951.000
2 Kertas dan Cover		
3 Bahan Cetak	0	3.865.000
4 Benda Pos	4.450.000	792.000
5 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
6 Bahan Komputer		
7 Perabot Kantor		
8 Alat Listrik	0	2.147.000
9 Perlengkapan Dinas		
10 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa		
11 Perlengkapan Pendukung Olahraga		
12 Suvenir/Cendera Mata		
13 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000	1.215.000
Jumlah	7.910.149	13.970.000

5.2.1.1.2.2. Obat-Obatan Rp 6.915.391,-

Obat-Obatan sebesar Rp 6.915.391, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.362.494 mengalami **penurunan** sebesar Rp (447.103) atau 106 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Obat	6.915.391	7.362.494
2 Obat-obatan Lainnya		
Jumlah	6.915.391	7.362.494

5.2.1.2 Aset Tetap Rp 250.905.881.357,98

Aset Tetap sebesar Rp 250.905.881.357,98 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 255.845.571.159,10 mengalami **penurunan** sebesar Rp (4.939.689.801,12) atau 22,26 % dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah	135.203.297.940,00	135.203.297.940,00
2 Peralatan dan Mesin	48.427.716.708,00	48.889.843.320,00
3 Gedung dan Bangunan	192.247.148.431,00	191.144.143.931,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.427.994.569,00	2.847.004.069,00
5 Aset Tetap Lainnya	1.053.970.900,00	1.163.504.100,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan		
7 Akumulasi Penyusutan	(129.454.247.190,02)	(123.412.222.200,90)
Jumlah	250.905.881.357,98	255.845.571.159,10



Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 379,257,793,360
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 700,658,441
Belanja Barang/Jasa	Rp 1,605,378,450
Hibah	Rp 219,000,000
Mutasi Masuk	Rp 1,143,338,346
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 5,183,353,641
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 0
Koreksi	Rp 5,477,500,000
Jumlah	Rp 14.329.228.878
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 83,710,000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 5,183,353,641
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 2,482,330,049
Mutasi Keluar	Rp 0
Koreksi	Rp 5,477,500,000
Jumlah	Rp 13.226.893.690
Grand Total	Rp 380,360,128,548

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2021.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

CATATAN : untuk SKPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.

5.2.1.2.1 Tanah Rp 135.203.297.940,-

Tanah sebesar Rp 135.203.297.940 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 135.203.297.940 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 0 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah Persil	131,305,435,440.00	131,305,435,440.00
2 Tanah Non Persil	2,839,565,000.00	2,839,565,000.00
3 Lapangan	1,058,297,500.00	1,058,297,500.00
Jumlah	135.203.297.940.00	135.203.297.940.00

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 135,203,297,940.00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 5,477,500,000.00
Jumlah	Rp 5,477,500,000.00
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp 5,477,500,000.00



Jumlah Rp 5,477,500,000.00

Grand Total Rp 135,203,297,940.00

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp 131,305,435,440.00

Tanah Persil sebesar Rp 131.305.435.440 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 131.305.435.440 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		
2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	131,305,435,440.00	131,305,435,440.00
3 Tanah untuk Bangunan Industri		
4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		
5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga		
6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah		
7 Tanah Persil Lainnya		
Jumlah	131,305,435,440.00	131,305,435,440.00

5.2.1.2.1.2 Tanah Non Persil Rp 2,839,565,000,-

Tanah Non Persil sebesar Rp 2.839.565.000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.839.565.000 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah Basah	2,839,565,000.00	2,839,565,000.00
2 Tanah Kering		
3 Tanah Perkebunan		
4 Tanah Hutan		
5 Tanah Tandus		
6 Tanah Padang Alang-Alang/Rumput		
7 Tanah Pertanian		
8 Tanah Pertambangan		
9 Tanah Non Persil Lainnya		
Jumlah	2,839,565,000.00	2,839,565,000.00

5.2.1.2.1.3 Lapangan Rp 1,058,297,500,-

Tanah Persil sebesar Rp 1.058.297.500, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.058.297.500 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tanah Lapangan Olahraga		
2 Tanah Lapangan Parkir		
3 Tanah Lapangan Penimbunan Barang		
4 Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
5 Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan		
6 Tanah Lapangan Terbang		
7 Tanah untuk Jalan	1,058,297,500.00	1,058,297,500.00
8 Tanah untuk Bangunan Air		
9 Tanah untuk Bangunan Instalasi		
10 Tanah untuk Bangunan Jaringan		
11 Tanah untuk Bangunan Bersejarah		
12 Tanah untuk Makam		
13 Tanah untuk Taman		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
14 Tanah untuk Latihan		
15 Tanah Daerah Pertahanan		
16 Tanah Lapangan PBB		
17 Tanah Kampung		
18 Emplasmnt		
19 Lapangan Lainnya		
Jumlah	1,058,297,500.00	1,058,297,500.00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp. 49,231,455,254.00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp 49.231.455.254 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 47.971.959.774 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.259.495.480 atau 97,44 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Besar	1,451,251,798.00	1,451,251,798.00
2 Alat Angkutan	16,817,098,411.00	16,188,168,048.00
3 Alat Bengkel dan Ukur	442,299,050.00	397,683,300.00
4 Alat Pertanian	15,485,000.00	38,485,000.00
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	22,801,200,669.00	21,988,982,873.00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	469,037,784.00	556,077,784.00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	950,557,321.00	932,702,321.00
8 Alat Laboratorium	95,285,000.00	100,035,000.00
9 Alat Persenjataan		
10 Komputer	5,948,075,221.00	6,295,573,650.00
11 Alat Eksplorasi		
12 Alat Pengeboran		
13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurniaan		
14 Alat Bantu Eksplorasi		
15 Alat Keselamatan Kerja		
16 Alat Peraga	241,165,000.00	23,000,000.00
17 Peralatan Proses/Produksi		
18 Rambu-Rambu		
19 Alat Olahraga		
Jumlah	49,231,455,254.00	47,971,959,774.00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 48,899,843,320
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 516,305,441
Belanja Barang/Jasa	Rp 23,801,450
Hibah	Rp 219,000,000
Mutasi Masuk	Rp 1,143,338,346
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 258,742,379
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 2,374,571,849
Koreksi	Rp 0
Jumlah	Rp 53,435,602,785
Berkurang	
Ekstrakotabel	Rp 1,775,000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 256,967,379
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 2,374,571,849



Mutasi Keluar	Rp 0
Koreksi	Rp 0
Jumlah	Rp 493,314,228
Grand Total	Rp 101,842,131,877

5.2.1.2.2.1 Alat Besar Rp 1,451,251,798,-

Alat Besar sebesar Rp 1,451,251,798.00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,451,251,798.00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 0 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Besar Darat		
2 Alat Besar Apung		
3 Alat Bantu	1,451,251,798.00	1,451,251,798.00
Jumlah	1,451,251,798.00	1,451,251,798.00

5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan Rp 16,817,098,411,-

Alat Angkutan sebesar Rp 16.817.098.411 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 16.817.098.411 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Angkutan Darat Bermotor	16,793,328,411.00	16,164,398,048.00
2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	23,770,000.00	23,770,000.00
3 Alat Angkutan Apung Bermotor		
4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		
5 Alat Angkutan Bermotor Udara		
Jumlah	16,817,098,411.00	16,817,098,411.00

5.2.1.2.2.3 Alat Bengkel dan Ukur Rp 397,683,300,-

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp 397.683.300 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 442.299.050 mengalami **penurunan** sebesar Rp (44,615,750.00) atau 111 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Bengkel Bermesin	309,018,600.00	353,634,350.00
2 Alat Bengkel Tak Bermesin	88,664,700.00	88,664,700.00
3 Alat Ukur		
Jumlah	397,683,300.00	442,299,050.00



5.2.1.2.2.4 Alat Pertanian Rp 15,485,000,-

Alat Pertanian sebesar Rp 15,485,000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 38,485,000.00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 23,000,000 atau 223 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Pengolahan	15,485,000.00	38,485,000.00
Jumlah	15,485,000.00	38,485,000.00

5.2.1.2.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 21,989,982,873

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 21,989,982,873 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 22,801,200,669 mengalami **penurunan** sebesar Rp (811,217,796) atau 104 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Kantor	2,700,899,556.00	2,869,947,649.00
2 Alat Rumah Tangga	18,833,921,539.00	19,468,766,242.00
3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	454,161,778.00	462,486,778.00
Jumlah	21,989,982,873.00	22,801,200,669.00

5.2.1.2.2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 469,037,784,-

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp 469,037,784 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 556,077,784 mengalami **penurunan** sebesar Rp (87,040,000) atau 142 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Studio	254,352,784.00	307,052,784.00
2 Alat Komunikasi	214,085,000.00	245,425,000.00
3 Peralatan Pemancar	600,000.00	3,600,000.00
4 Peralatan Komunikasi Navigasi		
Jumlah	469,037,784 .00	556,077,784.00

5.2.1.2.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 950,557,321,-

Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp 950,557,321 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 932,702,321 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 17,855,000 atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Kedokteran	936,557,321.00	901,970,521.00
2 Alat Kesehatan Umum	14,000,000.00	30,731,800.00
Jumlah	950,557,321.00	932,702,321.00



5.2.1.2.2.8 Alat Laboratorium Rp 95,285,000,-

Alat Laboratorium sebesar Rp 95,285,000.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 100,035,000.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (4,750,000) atau 111% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Unit Alat Laboratorium	53,600,000.00	55,350,000.00
2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
3 Alat Peraga Praktik Sekolah	41,685,000.00	41,685,000.00
4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		
5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan		
6 Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya		3,000,000.00
7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
8 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica		
9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi		
Jumlah	95,285,000.00	100,035,000.00

5.2.1.2.2.9 Komputer Rp 5,948,075,221,-

Komputer sebesar Rp 5,948,075,221, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,295,573,650 mengalami **penurunan*** sebesar Rp (347,498,429) atau 11 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Komputer Unit	5,090,832,430.00	5,488,168,130.00
2 Peralatan Komputer	857,242,791.00	807,405,520.00
Jumlah	5,948,075,221.00	6,295,573,650.00

5.2.1.2.2.10 Alat Peraga Rp 241,165,000,-

Alat Peraga sebesar Rp 241,165,000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 23,000,000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 218,165,000 atau 10 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	241,165,000.00	23,000,000.00
Jumlah	241,165,000.00	23,000,000.00

5.2.1.2.2.11 Alat Olahraga Rp 53,095,000,-

Alat Olahraga sebesar Rp 53,095,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 71,050,000 mengalami **penurunan** sebesar (Rp 17,955,000) atau 1,34 % dengan rincian sebagai berikut

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Peralatan Olahraga	53,095,000.00	71,050,000.00
Jumlah	53,095,000.00	71,050,000.00



5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp 192,247,148,431,-

Gedung dan Bangunan sebesar Rp 192,247,148,431 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 188,144,143,931 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4,103,004,500 atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bangunan Gedung	189,524,520,931.00	189,549,650,431.00
2 Monumen	32,619,000.00	32,619,000.00
3 Bangunan Menara		
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti	2,690,008,500.00	1,561,874,500.00
Jumlah	192,247,148,431.00	188,144,143,931.00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 191,144,143,931
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 184,353,000
Belanja Barang/Jasa	Rp 1,397,017,000
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 4,291,015,762
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 197,016,529,693
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp 81,935,000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 4,687,446,262
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 4,769,381,262
Grand Total	Rp 192,247,148,431

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung Rp 189,524,520,931

Bangunan Gedung sebesar Rp 189,524,520,931 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 189,549,650,431 mengalami **penurunan** sebesar Rp(25,129,500) atau 1 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja	69,537,742,193.00	66,603,811,109.00
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	119,986,778,738.00	122,945,839,322.00
Jumlah	189,524,520,931.00	189,549,650,431.00



5.2.1.2.3.2 Monumen Rp 32,619,000

Monumen sebesar Rp 32,619,000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 32,619,000 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	32,619,000.00	32,619,000.00
Jumlah	32,619,000.00	32,619,000.00

5.2.1.2.3.3 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 2,690,008,500

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp 2,690,008,500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,561,874,500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1,128,134,000 atau 58% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tugu/Tanda Batas	2,690,008,500.00	1,561,874,500.00
Jumlah	2,690,008,500.00	1,561,874,500.00

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 3,427,994,569,-

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 3,427,994,569 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,847,004,069 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 580,990,500 atau 83 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	52,859,000.00	52,859,000.00
2 Bangunan Air	3,267,301,569.00	2,686,311,069.00
3 Instalasi	25,000,000.00	25,000,000.00
4 Jaringan	82,834,000.00	82,834,000.00
Jumlah	3,427,994,569.00	2,847,004,069.00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 2,822,004,069
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp 184,560,000
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 396,430,500
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 580,990,500
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp



Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 3,402,994,569

5.2.1.2.4.1 Jalan dan Jembatan Rp 52,859,000,-

Jalan dan Jembatan sebesar Rp 52,859,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 52,859,000 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Jalan	52,859,000.00	52,859,000.00
2 Jembatan		
Jumlah	52,859,000.00	52,859,000.00

5.2.1.2.4.2 Bangunan Air Rp 3,257,301,569,-

Bangunan Air sebesar Rp 3,257,301,569 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,676,311,069 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 580,990,500 atau 82% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bangunan Air Irigasi		
2 Bangunan Pengairan Pasang Surut		
3 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder		
4 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	324,000,000.00	324,000,000.00
5 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1,338,265,321.00	955,895,321.00
6 Bangunan Air Bersih/Air Baku	1,595,036,248.00	1,396,415,748.00
7 Bangunan Air Kotor	10,000,000.00	10,000,000.00
Jumlah	3,257,301,569.00	2,676,311,069.00

5.2.1.2.4.3 Instalasi Rp 25,000,000,-

Instalasi sebesar Rp,25,000,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,25,000,000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 0 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Instalasi Air Bersih/Air Baku	25,000,000.00	25,000,000.00
2 Instalasi Air Kotor		
3 Instalasi Pengolahan Sampah		
4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
5 Instalasi Pembangkit Listrik		
6 Instalasi Gardu Listrik		
7 Instalasi Pertahanan		
8 Instalasi Gas		
9 Instalasi Pengaman		
10 Instalasi Lain		
Jumlah	25,000,000	25,000,000

5.2.1.2.4.4 Jaringan Rp 82,834,000,-

Jaringan sebesar Rp 82,834,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 82,834,000 mengalami **penurunan** sebesar Rp,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
--	-----------	-----------



1 Jaringan Air Minum	82,334,000.00	82,334,000.00
2 Jaringan Listrik		
3 Jaringan Telepon	500,000.00	500,000.00
4 Jaringan Gas		
Jumlah	82,834,000	82,834,000

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp 1,053,970,900,-

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp, 1,053,970,900,- apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1,163,504,100 mengalami **penurunan** sebesar Rp (109,533,200) atau 110% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	418,871,600.00	482,999,800.00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	635,099,300.00	680,504,300.00
3 Hewan		
4 Biota Perairan		
5 Tanaman		
6 Barang Koleksi Non Budaya		
7 Aset Tetap Dalam Renovasi		
Jumlah	1,053,970,900.00	1,163,504,100.00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 1,163,504,100
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 20,750,000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 1,184,254,100
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 22,525,000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 107,758,200
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 130,283,200
Grand Total	Rp 1,314,537,300



5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan Rp 418,871,600,-

Bahan Perpustakaan sebesar Rp 418,871,600.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 482,999,800.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (64,128,200.00) atau 115% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan Tercetak	416,521,600.00	480,649,800.00
2 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro		
3 Kartografi, Naskah dan Lukisan	1,850,000.00	1,850,000.00
4 Musik		
5 Karya Grafika (Graphic Material)	500,000.00	500,000.00
6 Three Dimensional Artifacts and Realita		
7 Tarscalt		
Jumlah	418,871,600.00	482,999,800.00

5.2.1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp 634,199,300,-

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp 634,199,300.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 679,604,300.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (45,405,000.00) atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Barang Bercorak Kesenian	626,189,300.00	649,069,300.00
2 Alat Bercorak Kebudayaan	8,010,000.00	30,535,000.00
3 Tanda Penghargaan	900,000.00	900,000.00
Jumlah	634,199,300.00	679,604,300.00

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Rp (129,454,247,190.02)

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp (129,454,247,190.02) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (123,412,222,200.90) mengalami **kenaikan** sebesar Rp (6,042,024,989.12) atau 95,33% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(42,240,729,573.59)	(40,140,061,306.50)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(85,808,590,389.25)	(81,979,037,088.29)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1,404,927,227.18)	(1,293,123,806.11)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah	-129,454,247,190.02	-123,412,222,200.90

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp (42,187,634,573.59)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp (42,187,634,573.59) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (40,069,011,306.50) mengalami **kenaikan** sebesar Rp 92,118,623,267.09) atau 95% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1,313,702,236.75)	-1,170,308,199.50
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(14,864,876,386.00)	-13,624,431,423.00
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(364,541,300.00)	-392,305,550.00
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(14,235,000.00)	-36,610,000.00
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(19,024,000,793.68)	-18,335,253,549.00
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(450,732,784.00)	-533,757,784.00
7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(842,664,654.37)	-793,138,321.00
8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(77,211,000.00)	-72,311,500.00
9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan		



10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(5,212,145,418.79)	-5,087,894,980.00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi		
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran		
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi		
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja		
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(23,525,000.00)	-23,000,000.00
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi		
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu		
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(53,095,000.00)	-71,050,000.00
	Jumlah	-42,187,634,573.59	-40,069,011,306.50

5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Rp (143,394,037.25)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp (143,394,037.25) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (71,697,018.63) mengalami **kenaikan** sebesar Rp (71,697,018.62) atau 50% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	
0		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	
1		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	
2		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	
3		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Floating Excavator	
4		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger	
5		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	
6		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	
7		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	
8		
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	
9		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	
0		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	
1		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	60,868,893.62
2		5
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	121,737,787.25
3		10,828,125
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	21,656,250.00
2		
4		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	
5		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	
6		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	
7		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	
8		
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatroo	
9		
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
0		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam		
1		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering		
2		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen		
3		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya		
4		
Jumlah	143,394,037.25	71,697,018.63

5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Rp (182,197,875.00)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp 182,197,875.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 60,732,624.99 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 121,465,250.01 atau 33,33% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	163,183,750.00	54,394,583.33
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
4 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16,014,125.00	5,338,041.66
5 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
6 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat		
7 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur		
8 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel		
9 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		
10 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		
11 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	3,000,000	1,000,000
12 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor		
13 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya		
14 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang		
15 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		
16 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus		
17 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer		
18 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya		
19 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang		
20 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang		
21 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus		
22 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya		
23 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang		
24 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya		
Jumlah	182,197,875.00	60,732,624.99



5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur Rp (16,851,500.00)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp 16,851,500.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,106,437.50 mengalami **penurunan** sebesar Rp 14,745,062.5 atau 12,5% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	446,500.00	55,812.5
2 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik		
4 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service	9,815,000.00	1,226,875
5 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin		
6 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	2,500,000.00	312,500
7 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus		
8 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las	550,000.00	68,750
9 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es		
10 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya		
11 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam		
12 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik		
13 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service		
14 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat		
15 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	1,000,000.00	125,000
16 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	200,000.00	25,000
17 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	560,000.00	70,000
18 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi		
19 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu		
20 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu		
21 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting		
22 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1,780,000.00	222,500
23 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		
24 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal		
25 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia		
26 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian		
27 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain		
28 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi		
29 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope		
30 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester		
31 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding		
32 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain		
33 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara		
34 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak		
35 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering		
36 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan		
37 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya		
38 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor		
39 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set		
40 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam		
41 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan		
42 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu		
43 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop		
44 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya		
Jumlah	16,851,500.00	2,106,437.50



5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian Rp,00

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp (625.000), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (625,000) mengalami **penurunan** sebesar Rp 0 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	625,000.00	625,000.00
2 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen		
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		
5 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian		
6 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing		
7 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen		
8 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan		
9 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan		
10 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya		
Jumlah	625,000.00	625,000.00

5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp (7,915,000.00)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar R(7,915,000.00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,638,333.32 mengalami **penurunan*** sebesar Rp 5,276,666.68 atau 33,33% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2,600,000.00	866,666.66
2 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5,255,000.00	1,751,666.66
3 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar		
4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak		
5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah		
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya		
7 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		
8 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB		
9 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM		
10 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF		
11 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF		
12 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial		
13 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat- Alat Sandi		
14 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus		
15 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional		
16 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat		
17 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya		
18 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW		
19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW		
20 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM		
21 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF		
22 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF		
23 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW		
24 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW		
25 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM		
26 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF		
27 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	60,000.00	20,000
28 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF		
29 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF		
30 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
31 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF		
32 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU		
33 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave Terrestrial		
34 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO		
35 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Dummy Load		
36 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher Antena		
37 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena		
38 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Feeder		
39 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Humidity Control		
40 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment		
41 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF		
42 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF		
43 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF		
44 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF		
45 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima		
46 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF		
47 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF		
48 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF		
49 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF		
50 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF		
51 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF		
52 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF		
53 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF		
54 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF		
55 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF		
56 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF		
57 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF		
58 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF		
59 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF		
60 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah		
61 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi		
62 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan		
63 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio		
64 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga		
65 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya		
66 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System		
67 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)		
68 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)		
69 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar		
70 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi		
71 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi		
72 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya		
Jumlah	7,915,000.00	2,638,333.32



5.2.1.2.6.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp, (56,647,166.70)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp 56,647,166.70, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 56,647,166.70 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 0 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	56,647,166.70	56,647,166.70
2 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah		
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
6 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT		
7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata		
8 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam		
9 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary		
10 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak		
11 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik		
12 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		
13 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)		
14 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung		
15 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic		
16 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy		
17 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah		
18 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi		
19 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir		
20 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin		
21 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat		
22 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa		
23 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi		
24 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU		
25 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU		
26 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung		
27 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine		
28 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi		
29 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat		
30 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut		
31 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara		
32 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian		
33 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga		
34 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya		
Jumlah	56,647,166.70	56,647,166.70



5.2.1.2.6.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Rp ()

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp mengalami **kenaikan** sebesar Rp atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan		
2 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan		
3 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia		
4 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika		
5 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi		
6 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
7 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia		
8 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan		
9 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Cokok Tanam		
10 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik		
11 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum		
12 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi		
13 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia		
14 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi		
15 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi		
16 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi		
17 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film		
18 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan		
19 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi		
20 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika		
21 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrodinamika		
22 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Klimatologi		
23 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Peleburan		
24 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir		
25 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan		
26 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola		
27 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metalografi		
28 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengelasan		
29 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan		
30 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam		
31 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metrologi		
32 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pelapisan Logam		
33 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
34 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil		
35 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil		
36 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
75 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah		
76 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas		
77 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:IPS		
78 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Agama		
79 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Keterampilan		
80 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Kesenian		
81 Akumulasi Penyusutan Alat Sekolah-Alat Peraga Praktik Studi:Olahraga		
82 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN		
83 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)		
84 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan		
85 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK		
86 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya		
87 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector		
88 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic		
89 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System		
90 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display		
91 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply		
92 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device		
93 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics		
94 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator		
95 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System		
96 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya		
97 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan		
98 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja		
99 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan		
100 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment		
101 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi		
102 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya		
103 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment		
104 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device		
105 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi		
106 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya		
107 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah		
108 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara		
109 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan		
110 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan		
111 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
112 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya		
113 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage		
114 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber		
115 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System		
116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel		
117 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes		
118 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum		
119 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium		
120 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop		
121 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop		
122 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop		
123 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop		
124 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop		
125 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop		
126 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB		
127 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment		
128 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya		
129 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik		
130 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator		
131 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik		
132 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik		
133 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu		
134 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain		
135 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus		
136 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran		
137 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran		
138 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat		
139 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya		
Jumlah		



5.2.1.2.6.1.8 Akumulasi Penyusutan Komputer Rp, (5,212,145,418.79)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp 668,801,138.79 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 133,760,227.77 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 535,040,911.02 atau 20% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan		
2 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	548,411,005.83	109,682,201.17
3 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		
4 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	750,000.00	150,000
5 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	8,256,250.00	1,651,250
6 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	72,623,049.63	14,524,609.93
7 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	38,760,833.33	7,752,166.67
8 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya		
Jumlah	668,801,138.79	133,760,227.77

5.2.1.2.6.1.9 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Rp, ()

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga sebesar Rp, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp mengalami **kenaikan** sebesar Rp atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan		
2 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan		
3 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya		
Jumlah		

5.2.1.2.6.1.10 Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga Rp, (53,095,000)

Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga sebesar Rp (53,095,000.00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (71,050,000.00) mengalami **penurunan** sebesar Rp 17,955,000.00 atau 134% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan		
2 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam		
3 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air		
4 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara		
5 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	(53,095,000.00)	-71,050,000.00
Jumlah	(53,095,000.00)	-71,050,000.00



5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp, (85,582,261,436.29)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp (85,582,261,436.29), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (81,799,953,977.68) mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp - 3,782,307,458.61 atau 96% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(85,567,909,076.29)	-81,786,253,997.68
2 Akumulasi Penyusutan Monumen	(14,352,360.00)	-13,699,980.00
3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara		
4 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(226,328,952.96)	-179,083,110.61
Jumlah	-85,582,261,436.29	-81,799,953,977.68

5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Rp, (85,567,909,076.29)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp (85,567,909,076.29), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (81,786,253,997.68) mengalami **kenaikan** sebesar Rp - 3,781,655,078.61 atau 96% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(85,567,909,076.29)	-81,786,253,997.68
2 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang		
3 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar		
4 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi		
5 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium		
6 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan		
7 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium		
8 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
9 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
10 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
11 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga		
12 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		
13 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		
14 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool		
15 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pemotong Hewan		
16 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan		
17 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum		
18 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara		
19 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelaikan		
20 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan		
21 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Rumah Tahanan		
22 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium		
23 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan		
24 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Persidangan		
25 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka		
26 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam		
27 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
28 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri		
29 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan		
30 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
31 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika		
32 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum		
33 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir		
34 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
35 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Stasiun Bus		
36 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman		
37 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		
39 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II		
40 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		
41 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan		
42 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama		
43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel		
44 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel		
45 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun		
46 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan		
47 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan		
48 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen		
49 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun		
50 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		
Jumlah	(85,567,909,076.29)	-81,786,253,997.68

5.2.1.2.6.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen Rp, (14,352,360.00)

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar Rp, (14,352,360.00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (13,699,980.00) mengalami **kenaikan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi		
2 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu		
3 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(14,352,360.00)	-13,699,980.00
4 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya		
Jumlah	(14,352,360.00)	-13,699,980.00

5.2.1.2.6.2.3 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas Rp, (226,328,952.96)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp (226,328,952.96) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (179,083,110.61) mengalami **kenaikan** sebesar Rp -47,245,842.35 atau 79% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	(226,328,952.96)	-179,083,110.61
2 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi		
3 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya		
4 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar		
5 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya		
Jumlah	(226,328,952.96)	-179,083,110.61



5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp, (1,372,635,127.18)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp (1,372,635,127.18) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (1,263,592,839.44) mengalami **kenaikan** sebesar Rp -109,042,287.74 atau 92% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(52,859,000.00)	-52,859,000.00
2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1,298,442,793.85)	-1,189,733,839.44
3 Akumulasi Penyusutan Instalasi	(21,333,333.33)	-21,000,000.00
4 Akumulasi Penyusutan Jaringan	(32,292,100.00)	-29,530,966.67
Jumlah	-1,372,635,127.18	-1,263,592,839.44

5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp, (52,859,000.00)

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp (52,859,000.00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (52,859,000.00) mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		
2 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(52,859,000.00)	-52,859,000.00
3 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten		
4 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota		
5 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa		
6 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol		
7 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api		
8 Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang		
9 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus		
10 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya		
11 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional		
12 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Provinsi		
13 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kabupaten		
14 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Kota		
15 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Desa		
16 Akumulasi Penyusutan pada Jalan Tol		
17 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api		
18 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang		
19 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus		
20 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan		
21 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal		
22 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur		
23 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya		
Jumlah	(52,859,000.00)	-52,859,000.00

5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rp (1,298,442,793.85)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp (1,298,442,793.85), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (1,189,733,839.44) mengalami **kenaikan** sebesar Rp 108,708,954.41 atau 92% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi		
2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi		
3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi		
4 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi		
5 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi		
6 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi		
7 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi		
8 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	(1,298,442,793.85)	-1,189,733,839.44
9 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Waduk Pasang Surut		
10 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut		
11 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut		
12 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut		
13 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut		
14 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut		
15 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut		
16 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya		
17 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa		
18 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa		
19 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa		
20 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa		
21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa		
22 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa		
23 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa		
24 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya		
25 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
26 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai		
27 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai		
28 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
29 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai		
30 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai		
31 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		
32 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air		
33 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air		
34 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air		
35 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
36 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air		
37 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air		
38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah		
39 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya		
40 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku		
41 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
42 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku		
43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku		
44 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
45 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
46 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor		
47 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor		
48 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor		
49 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor		
50 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor		
51 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya		
Jumlah	(1,298,442,793.85)	-1,189,733,839.44

5.2.1.2.6.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi Rp, (21,333,333.33)

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar Rp (21,333,333.33), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (21,000,000.00) mengalami **kenaikan** sebesar Rp 333,333.33 atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan		
2 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air		
3 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam		
4 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal		
5 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(21,333,333.33)	-21,000,000.00
6 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik		
7 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri		
8 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian		
9 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya		
10 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik		
11 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
12 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah		
13 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya		
14 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan		
15 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis		
16 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan		
17 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya		
18 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		
19 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		
20 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)		
21 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)		
22 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		
23 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
24 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		
25 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		
26 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
27 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)		
28 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera		
29 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya		
30 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk		
31 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi		
32 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik		
33 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya		
34 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat		
35 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya		
36 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas		
37 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas		
38 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas		
39 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya		
40 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir		
41 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir		
42 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif		
43 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya		
44 Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain		
Jumlah	(21,333,333.33)	-21,000,000.00

5.2.1.2.6.3.4 Akumulasi Penyusutan Jaringan Rp, (32,292,100.00)

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp (32,292,100.00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (29,530,966.67) mengalami **kenaikan** sebesar Rp -2,761,133.33 atau 91,44% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa		
2 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi		
3 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi		
4 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah		
5 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya	(32,292,100.00)	-29,530,966.67
6 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi		
7 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		
8 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		
9 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah		
10 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah		
11 Akumulasi Penyusutan Jaringan Jaringan Telepon di dalam Air		
12 Akumulasi Penyusutan Jaringan Jaringan dengan Media Udara		
13 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya		
14 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi		
15 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi		
16 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas		
17 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM		
18 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya		
Jumlah	(32,292,100.00)	-29,530,966.67



5.2.1.3 Aset Lainnya Rp, 3,101,436,782.00

Aset Lainnya sebesar Rp, 3,101,436,782.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4,031,506,960.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (930,070,178.00) atau 130% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Tagihan Jangka Panjang		
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
3 Aset Tidak Berwujud	112,650,500.00	519,580,500.00
4 Aset Lain-lain	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(90,521,100.00)	-475,321,700.00
6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2,954,103,281.99)	-3,843,840,759.00
Jumlah	3,101,436,782.00	4,031,506,960.00

5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud Rp 112,650,500.00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp, 112,650,500.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,519,580,500.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (406,930,000.00) atau 461,2% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Aset Tidak Berwujud-Goodwill		
2 Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise		
3 Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		
4 Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		
5 Aset Tidak Berwujud-Software	112,650,500.00	519,580,500.00
6 Aset Tidak Berwujud-Kajian		
7 Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya		
8 Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan		
9 Aset Tidak Berwujud-Lainnya		
Jumlah	112,650,500.00	519,580,500.00

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain Rp 3,079,307,382.00

Aset Lain-Lain sebesar Rp 3,079,307,382.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,987,248,160.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (907,940,778.00) atau 129% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		
3 Aset Tetap Lain-Lain		
Jumlah	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00



5.2.1.3.2.1 Aset Rusak Berat/Usang Rp 3,079,307,382.00

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp 3,079,307,382.00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,3,987,248,160.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (907,940,778.00) atau 129% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00
	Jumlah	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00

CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya

5.2.1.3.2.2 Aset Tetap Lain-Lain Rp 3,079,307,382.00

Aset Tetap Lain-Lain sebesar Rp 3,079,307,382.00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,987,248,160.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (907,940,778.00) atau 129% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Tetap Lain-Lain	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00
	Jumlah	3,079,307,382.00	3,987,248,160.00

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp (90,521,100.00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp (90,521,100.00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (475,321,700.00) mengalami **penurunan** sebesar Rp (384,800,600.00) atau 525% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise		
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(90,521,100.00)	-475,321,700.00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian		
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Aset Tak Berwujud Lainnya		
	Jumlah	(90,521,100.00)	-475,321,700.00

5.2.1.3.3.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software Rp, (90,521,100.00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp (90,521,100.00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (475,321,700.00) mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp (384,800,600.00) atau 525% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(90,521,100.00)	-475,321,700.00
	Jumlah	(90,521,100.00)	-475,321,700.00



5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp, (2,954,103,281.99)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp (2,954,103,281.99), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (3,843,840,759.00) mengalami **penurunan** sebesar Rp (889,737,477.01) atau 130% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa	(2,954,103,281.99)	-3,843,840,759.00
2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerja Sama Pemanfaatan		
3 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		
4 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		
5 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai		
6 Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		
Jumlah	(2,954,103,281.99)	-3,843,840,759.00

5.2.1.3.4.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa Rp, (2,954,103,281.99)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp (2,954,103,281.99), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp (3,843,840,759.00) mengalami **penurunan** sebesar Rp (889,737,477.01) atau 130% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa	(2,954,103,281.99)	-3,843,840,759.00
Jumlah	(2,954,103,281.99)	-3,843,840,759.00

5.2.2 EKUITAS Rp, 657,396,805,542.31

Ekuitas sebesar Rp 657,396,805,542.31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 455,207,233,075.46 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 202,189,572,466.8 atau 69,24% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Ekuitas	251,195,368,757.31	256,190,436,140.46
2 Ekuitas SAL		
3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	406,201,436,785.00	199,016,796,935.00
Jumlah	657,396,805,542.31	455,207,233,075.46

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:



No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	328,340,900.00	126,547,500.00	201,793,400.00
2	Beban	212,459,869,048.22	205,580,648,111.36	6,879,220,936.86
	Surplus/(Defisit) Operasional	(212,131,528,148.22)	(205,454,100,611.36)	(6,677,427,536.86)
3	Kegiatan Non Operasional			
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(212,131,528,148.22)	(205,454,100,611.36)	(6,677,427,536.86)
4	Pos Luar Biasa			
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(212,131,528,148.22)	(205,454,100,611.36)	(6,677,427,536.86)

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp, 328,340,900.00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 328,340,900 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 126,547,500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 201,793,400 atau 38,54% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	109,340,900.00		109,340,900.00	103,260,000.00	6,080,900.00	94,43
2	Pendapatan Transfer-LO						
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO			219,000,000.00	23,287,500.00	195,712,500.00	10,63
	Jumlah	109,340,900.00		328,340,900.00	126,547,500.00	201,793,400.00	38,54

Total Pendapatan-LRA : Rp 109,340,900.00

Penambahan

Saldo Akhir Piutang :

Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka :

Penambahan Pendapatan : Rp. 219,000,000.00

Total Penambahan Rp. 219,000,000.00

Pengurangan

Saldo Awal Piutang :

Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka :

Saldo Koreksi Piutang :

Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan :

BOS kepada sekolah milik Kab/Kota :



5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp, 109,340,900

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 109,340,900, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 103,260,000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6,080,900 atau 94,43% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO							
2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO	109,340,900.00			109,340,900.00	103,260,000.00	6,080,900.00	94,43
3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO							
Jumlah	109,340,900.00			109,340,900.00	103,260,000.00	6,080,900.00	94,43

Total Pendapatan-LRA :Rp 109,340,900.00

Penambahan

➤ Saldo Akhir Piutang :
Total Penambahan :

Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang :
➤ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka :
Total Pengurangan :

Total Pendapatan-LO : Rp 109,340,900.00

5.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Rp, 109,340,900

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp, 109,340,900, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 103,260,000 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 6,080,900 atau 94,43% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021(Rp)	2020(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	96,005,900			96,005,900	90,260,000	5,745,900	94,01
2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO							
3 Pendapatan Retribusi Terminal-LO							
4 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO	13,335,000			13,335,000	13,000,000	335,000	97,48
5 Pendapatan Retribusi Kepelabuhan-LO							
6 Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah-LO							
Jumlah	109,340,900			109,340,900	103,260,000	6,080,900	94,43



5.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Rp, 96,005,000,

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp 96,005,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 90,260,000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 5,745,0000 atau 94,01% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	12,100,000			12,100,000	80,660,000	(68,560,000)	667
2 Retribusi Penyewaan Tanah-LO	66,805,000			66,805,000		66,805,000	0
3 Retribusi Penyewaan Bangunan-LO							
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO							
5 Retribusi Pemakaian Ruang-LO	17,100,000			17,100,000	9,600,000	7,500,000	56,14
6 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO							
7 Retribusi Pemakaian Alat-LO							
Jumlah	96,005,000			96,005,000	90,260,000	5,745,0000	94,01

5.3.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO Rp, 13,335,000

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp 13,335,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 13,000,000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 335,000,000 atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	13,335,000			13,335,000	13,000,000	335,000,000	98
Jumlah	13,335,000			13,335,000	13,000,000	335,000,000	98

5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp, 219,000,000,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp 219,000,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 23,287,500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 195,712,500 atau 11% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah-LO	219,000,000			219,000,000	23,287,500	195,712,500	11
2 Dana Darurat- LO							
3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO							
Jumlah	219,000,000			219,000,000	23,287,500	195,712,500	11

Merupakan Pendapatan yang bersumber dari pihak ketiga berupa aset yang dihibahkan



5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO Rp, 219,000,000

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp 219,000,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 23,287,500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp,00 atau 11% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO					23,287,500	(23,287,500)	0
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO							
3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO							
4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO				219,000,000		219,000,000	0
5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO							
Jumlah				219,000,000	23,287,500	(197,712,500)	11

5.3.2 BEBAN DAERAH Rp,

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp 212,459,869,048.22, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 205,580,648,111.36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 205,580,648,111.36 atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI I TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	205,081,872,140.04			205,081,832,140.04	198,193,726,437.60	6,888,145,702	97
2 Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,377,996,908.18			7,377,996,908.18	7,386,921,673.76	20,646,587,576.16	100
3 Beban Transfer							
Jumlah	212,459,869,048.22			212,459,869,048.22	205,580,648,111.36	6,879,220,936.86	98

Total Belanja Daerah : Rp 212,459,869,048.22

Penambahan

➤ Saldo Akhir Utang	:	
➤ Koreksi Utang awal RSUD Dr.Moewardi	:	
➤ Reklasifikasi BTT	:	
➤ Reklasifikasi dari Belanja Lain	:	
➤ Pembayaran Utang 2019	:	
Total Penambahan	:	

Pengurangan

➤ Saldo Awal Utang	:	
Total Pengurangan	:	

Total Beban Daerah : Rp 212,459,869,048.22



5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 204,081,872,140.04

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp 204,081,872,140.04 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 198,193,726,437.6 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6,888,145,702 atau 97,11% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAHUN MUTASI KURANG ANGKUR (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	92,210,181,072.00		92,210,181,072.00	118,193,752,633	(24,983,571,561)	128
2 Beban Barang dan Jasa	81,831,807,668.04		81,831,807,668.04	79,808,009,204.60	2,023,798,463	98
3 Beban Bunga						
4 Beban Subsidi						
5 Beban Hibah	42,640,000		42,640,000	55,879,600	(13,239,600)	131
6 Beban Bantuan Sosial	29,961,000,000		29,961,000,000	99,785,000	29,861,215,000	0,33
7 Beban Penyisihan Piutang						
8 Beban Lain-Lain	36,243,400		36,243,400	36,300,000	(56,600)	100
Jumlah	204,081,872,140.04		204,081,872,140.04	198,193,726,437.6	6,888,145,702	97,11

Total Belanja Operasional

: Rp 204,081,872,140.04

Penambahan

- Saldo Akhir Utang :
- Koreksi Utang awal RSUD Dr.Moewardi :
- Reklasifikasi BTT :
- Reklasifikasi dari Belanja Lain :
- Pembayaran Utang 2019 :

Total Penambahan :

Pengurangan

- Saldo Awal Utang :

Total Pengurangan :

Total Beban Operasional

: Rp 204,081,872,140.04



5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp, 93,210,181,072

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp 93,210,181,072 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 93,359,710,133 mengalami **kenaikan** sebesar Rp (4,883,516,671) atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	45,003,482,798			45,003,482,798	47,520,005,664	(2,516,522,866)	106
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	48,206,698,274			48,206,698,274	45,839,704,469	2,366,993,805	95
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN							
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD							
5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH							
6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH							
7 Beban Pegawai BOS							
8 Beban Pegawai BLUD							
Jumlah	93,210,181,072			93,210,181,072	93,359,710,133	-4,883,516,671	100

Total Belanja Pegawai

: Rp 93,210,181,072

Penambahan

➤ Saldo Akhir Utang	:	
➤ Koreksi Utang awal RSUD Dr.Moewardi	:	
➤ Reklasifikasi BTT	:	
➤ Reklasifikasi dari Belanja Lain	:	
➤ Pembayaran Utang 2019	:	
Total Penambahan	:	

Pengurangan

➤ Saldo Awal Utang	:	
Total Pengurangan	:	

Total Beban Pegawai-LO

: Rp 93,210,181,072



5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp, 43,287,756,124

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp 43,287,756,124 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 47,520,005,664 mengalami **penurunan** sebesar Rp (4,232,249,540) atau 110% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji Pokok ASN	33,831,448,686			33,831,448,686	36,160,195,221	(2,328,746,535)	107
2 Beban Tunjangan Keluarga ASN	949,750,000			949,750,000	3,176,417,058	(2,226,667,058)	33,44
3 Beban Tunjangan Jabatan ASN	1,297,980,000			1,297,980,000	917,910,000	380,070,000	71
4 Beban Tunjangan Fungsional ASN	906,720,000			906,720,000	905,735,000	985,000	100
5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,066,815,000			1,066,815,000	1,194,485,000	(127,670,000)	112
6 Beban Tunjangan Beras ASN	1,760,819,880			1,760,819,880	1,603,523,640	157,296,240	91,06
7 Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	161,498,514			161,498,514	165,893,496	(4,394,982)	103
8 Beban Pembulatan Gaji ASN	435,267			435,267	423,737	11,530	97
9 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3,035,153,730			3,035,153,730	3,099,035,411	(63,881,681)	102
10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	69,283,764			69,283,764	296,387,101	(227,103,337)	428
11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	207,851,283			207,851,283		207,851,283	0
12 Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK							
Jumlah	43,287,756,124			43,287,756,124	47,520,005,664	(4,232,249,540)	110

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp, 48,206,698,274

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp 48,206,698,274 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 45,839,704,469 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2,366,993,805 atau 95,08% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	43,017,204,734			43,017,204,734	45,839,704,469	-2,822,499,735	107
2 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5,189,493,540			5,189,493,540		5,189,493,540	0
4 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan							



Profesi ASN					
5 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					
Jumlah	48,206,698,274	48,206,698,274	45,839,704,469	2,366,993,805	95,08

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp, 81,831,807,668.04

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 81,831,807,668.04 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 79,808,009,204.60 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 2,023,798,463 atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021(Rp)	2020(Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang	50,068,585,475			50,075,092,429.00	62,280,858,700.00	(12,205,766,271)	124
2 Beban Jasa	21,141,301,809			21,149,839,736.04	8,691,602,510.60	12,458,237,225	41,09
3 Beban Pemeliharaan	3,253,071,160			1,647,692,710.00	4,933,394,163.00	(3,285,701,453)	299,4
4 Beban Perjalanan Dinas	2,854,887,793			2,854,887,793.00	3,819,653,831.00	(964,766,038)	134
5 Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5,539,110,000			6,104,295,000.00	82,500,000.00	6,021,795,000	2
6 Beban Barang dan Jasa BOP							
7 Beban Barang dan Jasa BOS							
8 Beban Barang dan Jasa BLUD							
Jumlah	82,856,956,237			81,831,807,668.04	79,808,009,204.60	2,023,798,463	98

Total Belanja Barang dan Jasa :Rp 82,856,956,237

Penambahan

➤ Persediaan Awal	: Rp. 21.332.494
➤ Utang Persediaan Akhir	:
➤ Koreksi Persediaan	:
➤ Hibah Persediaan	:
➤ Reklas dari Belanja Lain	:
➤ Surplus Perolehan Persediaan	:
Total Penambahan	: Rp. 21.332.494,00

Pengurangan

➤ Utang Persediaan Awal	:
➤ Persediaan Akhir	: Rp. 14.825.540,00



Total Pengurangan : Rp. 14.825.540,00
Total Beban Barang dan Jasa : Rp 81,831,807,668.04

5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp, 50,075,092,429

Beban Barang terealisasi sebesar Rp 50,075,092,429 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 62,280,858,700 mengalami **penurunan** sebesar Rp 12,205,766,271 atau 19,6% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang Pakai Habis	50,068,585,475	21,332,494	14,825,540	50,075,092,429	62,280,858,700	12,205,766,271	19,6
2 Beban Barang Tak Habis Pakai							
3 Beban Barang Bekas Dipakai							
Jumlah	50,068,585,475	21,332,494	14,825,540	50,075,092,429	62,280,858,700	12,205,766,271	19,6

Total Belanja Barang :Rp 50,068,585,475

Penambahan

➤ Persediaan Awal	: Rp 21,332,494
➤ Utang Persediaan Akhir	:
➤ Koreksi Persediaan	:
➤ Hibah Persediaan	:
➤ Reklas dari Belanja Lain	:
➤ Surplus Perolehan Persediaan	:
Total Penambahan	: Rp 21,332,494

Pengurangan

➤ Utang Persediaan Awal	: Rp 14,825,540
➤ Persediaan Akhir	:
Total Pengurangan	: Rp 14,825,540

Total Beban Barang : Rp 50,075,092,429

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa Rp 21,149,839,736

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp 21,149,839,736 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,176,731,854 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp atau 34,5% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Jasa Kantor	20,004,682,571			20,004,682,571	7,587,300,154	13,016,950,717	35
2 Beban Jasa Asuransi	810,149,738			818,687,665	705,662,357	90,902,465	88,28
3 Beban Sewa Tanah							



*Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020*

4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	55,948,500	55,948,500	81,610,000	55,948,500	0
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,000,000	1,000,000	307,030,000	(188,000,000)	189
6	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan					
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya			10,000,000		
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	89,450,000	89,450,000		89,450,000	0
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	24,000,000	24,000,000		24,000,000	0
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS					
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	156,071,000	156,071,000		156,071,000	0
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN					
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi					
	Jumlah	21,141,301,809	21,149,839,736	8,691,602,511	(13,646,638,382)	34,5

Total Belanja Jasa : 21,149,839,736

Penambahan

➤	Belanja Dibayar Di Muka Awal	: 135,866,286,36
➤	Utang Jasa Akhir	:
➤	Hibah Jasa	:
	Total Penambahan	: 135,866,286,36

Pengurangan

➤	Belanja Dibayar Di Muka Akhir	: 127,328,359,32
➤	Utang Jasa Awal	:
➤	Koreksi Beban Jasa	:
➤	Reklas ke Belanja Lain	:
	Total Pengurangan	: 127,328,359,32

Total Beban Jasa : 21,149,839,736



5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp, 1,647,692,710

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp 1,647,692,710 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4,665,965,263 mengalami **penurunan** sebesar Rp -3,018,272,553 atau 284% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021(Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pemeliharaan Tanah							
2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	602,267,200			578,465,750	1,367,201,963	-576,887,313	2
3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,643,203,960			1,061,626,960	3,510,612,200	-2,448,985,240	331
4 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi							
5 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7,600,000			7,600,000		7,600,000	0
Jumlah	3,253,071,160			1,647,692,710	4,665,965,263	-3,018,272,553	284

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp, 2,854,887,793

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp 2,854,887,793 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,819,653,851 mengalami **penurunan** sebesar Rp (4,699,618) atau 132% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,809,547,793			2,809,547,793	3,691,950,621	(837,062,828)	129
2 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	45,340,000			45,340,000	127,703,210	(82,363,210)	282
Jumlah	2,854,887,793			2,854,887,793	3,819,653,831	(4,699,618)	132

Total Belanja Perjalanan Dinas : 2,854,887,793

Penambahan

➤ Utang Perjalanan Dinas Akhir :

➤ Reklas dari Belanja Lain :

Total Penambahan :

Pengurangan

➤ Utang Perjalanan Dinas Awal :

Total Pengurangan :

Total Beban Perjalanan Dinas : 2,854,887,793



5.3.2.1.2.5 Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp, 6,104,295,000

Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp6,104,295,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 76,500,000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp (6,021,795,000) atau 1,25% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,104,295,000			6,104,295,000	82,500,000	(6,021,795,000)	1,25
2 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat							
Jumlah	6,104,295,000			6,104,295,000	82,500,000	(6,021,795,000)	1,25

5.3.2.1.3 Beban Hibah Rp, 42,640,000,00

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp 42,640,000.00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 55,879,600.00 mengalami **penurunan** sebesar Rp (13,239,600.00) atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021(Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat							
2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				42,640,000.00		42,640,000.00	0
3 Beban Hibah kepada BUMN							
4 Beban Hibah Uang kepada BUMD							
5 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					55,879,600.00	(55,879,600.00)	0
6 Beban Hibah Dana BOS							
7 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik							
Jumlah				42,640,000.00	55,879,600.00	(13,239,600.00)	0

Total Belanja Hibah : 42,640,000

Penambahan

- Utang Hibah Akhir :
 - Reklas dari Belanja Lain :
- Total Penambahan :

Pengurangan

- Utang Hibah Awal :
- Total Pengurangan :

Total Beban Hibah : 42,640,000



5.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial Rp, 29,961,000,000,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp 29,961,000,000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 29,961,000,000 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021(Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	29,961,000,000			29,961,000,000		29,961,000,000	0
2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga							
3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat							
4 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)							
Jumlah	29,961,000,000			29,961,000,000		29,961,000,000	0

Total Belanja Bantuan Sosial : 29,961,000,000

Penambahan

➤ Utang Hibah Akhir	:	
➤ Reklas dari Belanja Lain	:	
Total Penambahan	:	

Pengurangan

➤ Utang Hibah Awal	:	
Total Pengurangan	:	

Total Beban Bantuan Sosial : 29,961,000,000

5.3.2.1.5 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain terealisasi sebesar Rp 36,243,400, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 36,243,400 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Lain-Lain	36,243,400		36,243,400	0
Jumlah	36,243,400		36,243,400	0

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp, 7,300,871,025.18

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 7,300,871,025.18 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7,386,921,674.31 mengalami **penurunan** sebesar Rp (86,050,649,13) atau 100 % dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,314,543,370.08	3,377,601,992.05	(63,058,662)	102



	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,887,072,370.96	3,900,333,710.65	(13,261,340)	101
3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	154,251,767.14	61,465,371.61	92,786,396	40
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya				
6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	22,129,400.00	47,520,600.00	(25,391,200)	215
7 Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Jumlah	7,300,871,025.18	7,386,921,674.31	(86,050,649.13)	100

5.3.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp, 3,314,543,370

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 3,314,543,370, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,377,601,992 mengalami penurunan sebesar Rp (63,058,621) atau **102 %** dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	143,394,037	143,394,037		1
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	614,099,600	641,688,350	(27,588,750)	
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16,851,500	16,851,500		1
4 Beban Penyusutan Alat Pertanian	625,000	625,000		1
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,797,697,927.34	1,832,467,164.80	(34,769,237)	102
6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7,915,000	7,460,000	455,000	95
7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	56,647,166.70	53,588,000	3,059,167	95
8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium	8,337,000	8,555,750	(218,750)	103
9 Beban Penyusutan Komputer	668,801,138.79	672,972,190	(4,171,051)	101
10 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi				
11 Beban Penyusutan Alat Pengeboran				
12 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian				
13 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi				
14 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja				
15 Beban Penyusutan Alat Peraga	175,000		175,000	0
16 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi				
17 Beban Penyusutan Rambu-Rambu				
18 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga				
Jumlah	3,314,543,370	3,377,601,992	(63,058,621)	102

5.3.2.2.1.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Besar Rp 143,394,037.25

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Besar terealisasi sebesar Rp 143,394,037.25, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 71,607,018.63 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 71,697,018.62 atau 50% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar Darat				
2 Beban Penyusutan Alat Besar Apung				
3 Beban Penyusutan Alat Bantu	143,394,037.25	71,697,018.63	71,697,018.62	50
Jumlah	143,394,037.25	71,697,018.63	71,697,018.62	50



5.3.2.2.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Angkutan Rp 614,099,600.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp 614,099,600.00 , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 206,699,866.67 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 407,399,733.33 atau 33,66% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	611,099,600.00	203,699,866.67	407,399,734	33,33
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1
3 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor				
4 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor				
5 Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara				
Jumlah	614,099,600.00	206,699,866.67	407,399,733.33	33,66

5.3.2.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Bengkel dan Ukur Rp 16,851,500.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Bengkel dan Ukur terealisasi sebesar Rp 16,851,500.00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4,212,875 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 12,638,625 atau 25% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	13,311,500.00	3,327,875	9,983,625	25
2 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	3,540,000.00	885,000	2,655,000	25
3 Beban Penyusutan Alat Ukur				
Jumlah	16,851,500.00	4,212,875	12,638,625	25

5.3.2.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Pertanian Rp 625,000.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp 625,000.00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 625,000.00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 1% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Pengolahan	625,000.00	625,000.00	0	1
Jumlah	625,000.00	625,000.00	0	1

5.3.2.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 16,851,500.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp 16,851,500.00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4,212,875 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 12,638,625 atau 25% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	13,311,500.00	3,327,875	9,983,625	25
2 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	3,540,000.00	885,000	2,655,000	25
3 Beban Penyusutan Alat Ukur				
Jumlah	16,851,500.00	4,212,875	12,638,625	25



5.3.2.2.1.6 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp, 7,855,000.00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp 7,855,000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,927,500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3,927,500 atau 50% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Studio	7,855,000.00	3,927,500	3,927,500	50
2 Beban Penyusutan Alat Komunikasi				
3 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar				
4 Beban Navigasi				
Jumlah	7,855,000.00	3,927,500	3,927,500	50

5.3.2.2.1.7 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp, 56,647,166.70**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp 56,647,166.70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 56.647,166.70 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Kedokteran	56,647,166.70	56,647,166.70	0	100
2 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum				
Jumlah	56,647,166.70	56,647,166.70	0	100

5.3.2.2.1.8 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Komputer Rp, 668,801,138.79,**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Komputer terealisasi sebesar Rp 668,801,138.79, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 578,508,539.07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 90,292,599.72 atau 86,5% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Komputer Unit	548,411,005.83	548,411,005.83	0	100
2 Beban Penyusutan Peralatan Komputer	120,390,132.96	30,097,533.24	90,292,599.72	25
Jumlah	668,801,138.79	578,508,539.07	90,292,599.72	86,5

5.3.2.2.1.9 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Peraga Rp, 175,000**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Peraga terealisasi sebesar Rp 175,000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 175,000 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	175,000	-	-	-
Jumlah	175,000			



5.3.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp, 3,887,072,370.96

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp 3,887,072,370.96 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 3,900,333,710.65 mengalami penurunan sebesar Rp, 13,261,340 atau 0.34 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	3,839,174,148.61	3,868,536,575.34	(29,362,427)	0,76
2 Beban Penyusutan Monumen	652,380.00	652,380.00	-	-
3 Beban Penyusutan Bangunan Menara				
4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	47,245,842.35	31,144,755.31	16,101,087	51,70
Jumlah	3,887,072,370.96	3,900,333,710.65	(13,261,340)	0,34

5.3.2.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Gedung Rp, 3,839,174,148.61

Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp, 3,839,174,148.61 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 3,868,536,575.34 mengalami penurunan sebesar Rp, (30,969,008.70) atau 4.13 % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,420,965,992.94	1,234,268,287.67	186,697,705.27	13,14
2 Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	2,416,601,573.27	2,634,268,287.67	(217,666,713.97)	(9,01)
Jumlah	3,839,174,148.61	3,868,536,575.34	(30,969,008.70)	4,13

5.3.2.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Monumen Rp, 652,380

Beban Penyusutan dan Amortisasi Monumen terealisasi sebesar Rp, 652,380 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 652,380 mengalami kenaikan/penurunan* sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	652,380	652,380		
Jumlah	652,380	652,380		

5.3.2.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp, 47,898,222.35

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp, 47,898,222.35 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 31,144,755.31 mengalami kenaikan sebesar Rp, 16,753,466.94 atau 34.98% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	47,898,222.35	31,144,755.31	16,753,466.94	34,98
Jumlah	47,898,222.35	31,144,755.31	16,753,466.94	34,98

5.3.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp, 151,490,663.81

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp 151,490,663.81 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 61,465,371.05 mengalami kenaikan sebesar Rp 92,786,397 atau 41% dengan rincian sebagai berikut :



	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77,125,883.57		77,125,884	0
2 Beban Penyusutan Bangunan Air	74,031,416.91	58,370,904.39	15,660,513	79
3 Beban Penyusutan Instalasi	333,333.33	333,333.33	-	-
4 Beban Penyusutan Jaringan	2,761,133.33	2,761,133.33	-	-
Jumlah	151,490,633.81	61,465,371.05	92,786,397	19.75

5.3.2.2.3.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Air Rp, 323,781,416.91

Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Air terealisasi sebesar Rp,323,781,416.91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 175,313,987.26 mengalami kenaikan sebesar Rp 148,467,429.65 atau 54,14% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi				
2 Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut				
3 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder				
4 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
5 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	42,491,510.71	42,491,510.71	0	100
6 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	31,289,906.20	7,822,476.55	23,467,429.65	25
7 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	250,000,000	125,000,000	125,000,000	50
Jumlah	323,781,416.91	175,313,987.26	148,467,429.65	54,14

5.3.2.2.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Rp, 31,289,906.20,

Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi terealisasi sebesar Rp 31,289,906.20, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7,822,476.55 mengalami kenaikan sebesar Rp 23,467,429.65 atau 25% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	31,289,906.20	7,822,476.55	23,467,429.65	25
2 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	250,000,000	125,000,000	125,000,000	50
3 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah				
4 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
5 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik				
6 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik				
7 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan				
8 Beban Penyusutan Instalasi Gas				
9 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman				
10 Beban Penyusutan Instalasi Lain				
Jumlah	31,289,906.20	7,822,476.55	23,467,429.65	25

5.3.2.2.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jaringan Rp, 16,666.67,

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jaringan terealisasi sebesar Rp 16,666.67, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 16,666.67 mengalami kenaikan/penurunan* sebesar Rp,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum				
2 Beban Penyusutan Jaringan Listrik				
3 Beban Penyusutan Jaringan Telepon	16,666.67	16,666.67	0	100
4 Beban Penyusutan Jaringan Gas				
Jumlah	16,666.67	16,666.67	0	100



5.3.2.2.4 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp, 22,129,400,**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp,22,129,400, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 47,520,600 mengalami penurunan sebesar Rp, 23,391,200 atau 114, 74% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise				
2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta				
3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten				
4 Beban Amortisasi Software	22,129,400	47,520,600	23,391,200	114,74
5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian				
Jumlah	22,129,400	47,520,600	23,391,200	114,74

5.3.2.2.4.1 **Beban Amortisasi Software Rp, 22,129,400,**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Software terealisasi sebesar Rp, 22,129,400 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 47,520,600 mengalami penurunan sebesar Rp, 23,391,200 atau 114, 74% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Software	22,129,400	47,520,600	23,391,200	114,74
Jumlah	22,129,400	47,520,600	23,391,200	114,74

5.3.2.2.5 **Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp,00**

Beban Penyusutan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah				
Jumlah				

5.3.2.2.5.1 **Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Rp,00**

Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah				
Jumlah				



5.3.2.3 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp, 24,537,567.50,

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp 24,537,567.50, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 24,537,567.50 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	24,537,567.50		24,537,567.50	0
Jumlah	24,537,567.50		24,537,567.50	0

5.3.2.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Rp, 24,537,567.50,

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar Rp 24,537,567.50, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 24,537,567.50 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	24,537,567.50		24,537,567.50	0
Jumlah	24,537,567.50		24,537,567.50	0

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	256,190,436,140.46	262,407,239,816.82	6,216,803,676.36	103
2	Surplus/Defisit-LO	(212,078,939,832.15)	(205,454,100,611.36)	6,624,839,220.79	97
3	RK-PPKD	207,184,639,850.00	199,016,796,935.00	8,167,842,915	96
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	(100,767,401.00)	220,500,000.00	321,267,401	219
	Ekuitas Akhir	251,195,368,757.31	256,190,436,140.46	(4,995,067,383.15)	102

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 256,190,436,140.46 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp, 212,078,939,832.15) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2021.



5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp 3,653,793,426), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas				
2	Koreks/Penyesuaian Piutang				
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang				
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan				
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen				
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen				
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen				
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	1,143,338,346.00	1,997,564,136.00	(854,225,790)	175
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	(1,143,338,346.00)	(1,781,064,136.00)	637,725,790	16
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	(3,754,560,827.00)	-	(3,75,560,827.00)	0
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi		4,000,000.00	4,000,000.00	0
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	3,653,793,426.00		3,653,793,426.00	0
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai				
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa				
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain				
	Jumlah	3,653,793,426	212,500,000	(321,267,401)	5,81

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp 1,143,338,346.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	1,143,338,346.00	4,739,437,912.00	(3,596,099,566.00)	415
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD				
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap				
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya				
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap				
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable				
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap				
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya				
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga				
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		(2,741,873,776.00)	(2,741,873,776.00)	0
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset				



Tetap				
Jumlah	1,143,338,346.00	1,997,564,136	(854,225,790)	58

5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp 3,653,793,426 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan				
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	3,653,793,426.00		3,653,793,426.00	0
	Jumlah	3,653,793,426.00		3,653,793,426.00	0

5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp, 3,754,560,827.00) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		20,000,000.00	20,000,000.00	0
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi				
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap				
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan				
5	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	0
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap				
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	(3,754,560,827.00)		(3,754,560,827.00)	
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi				
	Jumlah	(3,754,560,827.00)	0	(3,754,560,827.00)	0

5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar (Rp 3,653,793,426.00) disebabkan adanya lebih catat nilai penyusutan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya				
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya	3,653,793,426.00		3,653,793,426.00	0
	Jumlah	3,653,793,426.00		3,653,793,426.00	0



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

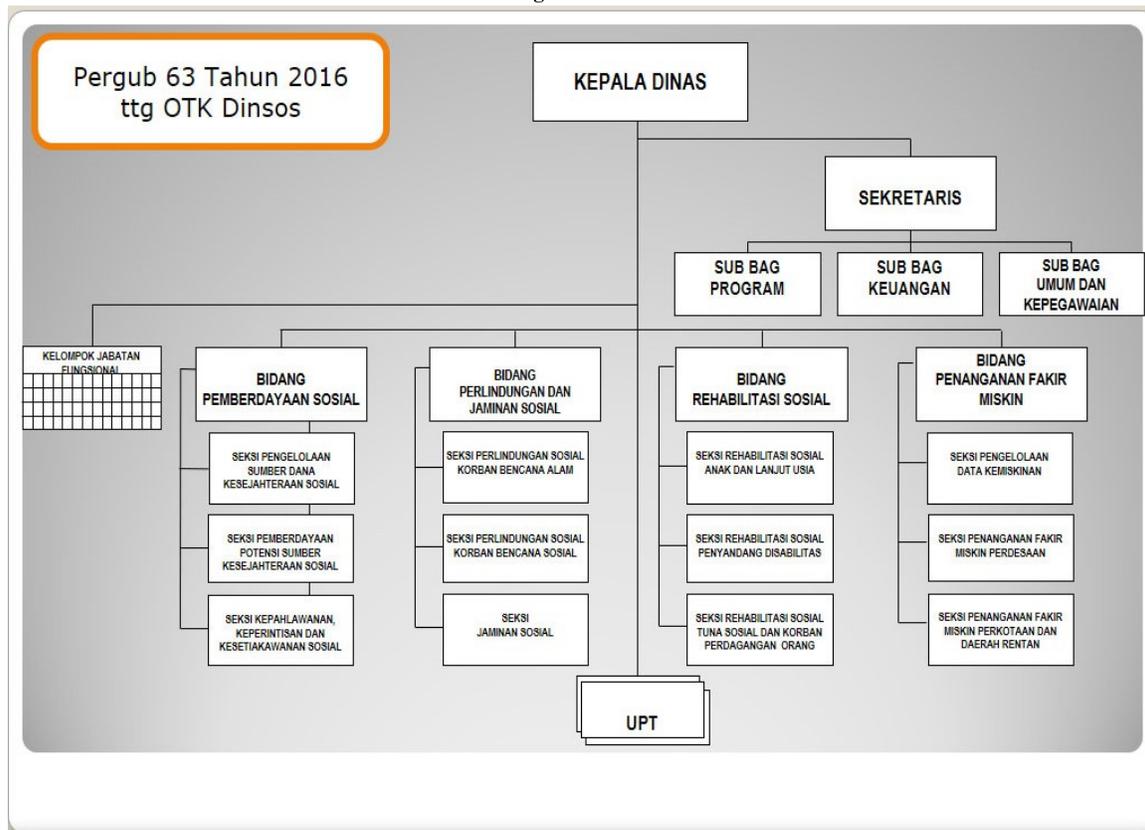
1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - 4) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan dinas kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pada gambar berikut:

Gambar 6.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial



Sumber : Pergub 63 Tahun 2016

1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 sejumlah 987 orang terbagi atas 196 orang pegawai bertugas pada kantor Dinas Sosial dan 647 orang pegawai bertugas pada Panti Pelayanan Sosial dan Rumah Pelayanan Sosial. Secara terperinci kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	LOKASI	TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		SD	SLTP	SLTA	D III	S1/ DIV	S.2	
1.	Dinas Sosial Prov Jateng	5	9	68	10	80	24	196
	a. PNS	4	3	49	8	75	24	163
	b. Harian Lepas							
	1) Masuk Data Base BKD	-	1	4	1	2	-	8



	2) Tidak Masuk Data Base BKD/Kontrak	1	5	15	1	3	-	25
2.	Unit Pelaksana Teknis (Panti dan Sasana)	39	46	374	40	243	49	647
	a. PNS	15	35	316	28	228	49	647
	b. Harian Lepas							
	1) Masuk Data Base BKD	16	3	7	1	3	-	29
	2) Tidak Masuk Data Base BKD/Kontrak	8	8	51	11	12	-	92
JUMLAH SELURUHNYA		44	55	442	50	323	73	987

Tabel 6.2 SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO.	LOKASI	PANGKAT/GOLONGAN					JUMLAH
		I	II	III	IV	HARLEP	
1.	Dinas Sosial Provinsi Jateng	3	29	116	15	33	196
2.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jateng	28	170	397	52	121	647
JUMLAH SELURUHNYA		53	199	513	67	154	987

Tabel 6.3. SDM BERDASARKAN JABATAN

NO	LOKASI	STRUKTURAL			FUNGSIONAL		JUMLAH
		ESL. II	ESL. III	ESLI IV	PEKSOS AHLI	PEKSOS TRAMPIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Sosial Prov. Jateng	1	5	15	-	-	21
2	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng	-	55	32	39	84	225
JUMLAH SELURUHNYA		1	60	47	39	84	244



Dalam melaksanakan langsung kepada masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Panti yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain :

Tabel 6.4. Nama, Alamat dan Kuota Panti dan Rumah Pelayanan Sosial

NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
I.	UPT Type A	
1.	Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar “MARDI UTOMO” Semarang	Jalan Mulawarman Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Semarang 50278 No Telp. : (024) 74681265 No Fax : (024) 74681265 Email: ppspgot.mardiotomo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual “PAMARDI MULYO” Demak	Jalan Sunan Kalijaga No. 46 Demak Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak 59511 Nomor Telepon : (0291) 685297 Nomor Faksimile : (0291) 685297 Sasaran Pelayanan : Penyandang Disabilitas Intelektual Kuota : 50 orang
2	Panti Pelayanan Sosial Anak “MANDIRI” Semarang	Jalan Amposari II / 4 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang - Semarang 50273 Nomor Telepon : (024) 6717036 Nomor Faksimile : (024) 6717036 Email : ppsa.mandiri@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Jalanan, Anak Nakal Kuota : 65 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia “PUCANG GADING” Semarang	Jalan Sarwo Edhi Wibowo KM. 1 Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 50193 Nomor Telepon : (024) 6722341 Nomor Faksimile : (024) 6722341 Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 100 orang
3.	Panti Pelayanan Sosial PMKS “MARGO WIDODO” Semarang	Jalan Raya Tugu Km. 9 Kelurahan Tambak Aji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50185 Nomor Telepon : (024) 8664105 Nomor Faksimile : (024) 8664105 Email: pprs.mgwidodo@gmail.com Sasaran Pelayanan : PMKS Kuota : 150 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “SONO RUMEKSO” Grobogan	Jalan Letjen. S. Parman No. 38A Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan 58111 No Telepon : (0292) 421776 No Fax : (0292) 421776 Sasaran Pelayanan : Disabilitas Mental Kuota : 65 orang



NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
4.	Panti Pelayanan Sosial Anak “WIRA ADHI KARYA” Ungaran	JalanKi Sarino Mangunpranoto No.39 Ungaran Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang 50501 Nomor Telepon : (024) 6921825 Nomor Fax : (024) 6921825 Email : ppsa.wak@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Putus Sekolah Kuota : 70 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia “WENING WERDOYO” Ungaran	JalanKutilang No.24 Ungaran Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 50511 Nomor Telepon : (024) 6922289 Nomor Fax : - Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 90 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita “WILOSO TOMO” Salatiga	Jalan Yos Sudarso No. 20 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 50714 No Telepon : (0298) 322928 No Faksimile : (0298) 322920 Sasaran Pelayanan : Balita Terlantar Kuota : 25 orang
5.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “NGUDI RAHAYU” Kendal	Desa Salamsari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal 51381 Nomor Telepon: (0294) 571029 Nomor Faksimile : (0294) 571029 Email: ppsep.ngudirahayu@gmail.com Sasaran Pelayanan : Disabilitas Mental Kuota : 187 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “BINA SEJAHTERA” Kendal	Jalan Kartika Jaya Kelurahan Wonosari Kecamatan Patebon Kab. Kendal 51351 Nomor Telepon: (0294) 383137 Nomor Faksimile : (0294) 383137 Sasaran Pelayanan : Disabilitas Mental Kuota : 50 orang
6.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “CEPIRING” Kendal	Jalan Sriagung Km. 1 Kelurahan Botomulyo Kecamatan Cepiring Kab. Demak 51352 Nomor Telepon : (0294) 381990 Nomor Faksimile : (0294) 381990 Email : ppslu.cepiring@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia “WELERI” Kendal	Jalan Tamtama No. 112 Kelurahan Penyangkringan Kec. Weleri Kab. Kendal 51355 Nomor Telepon : (0294) 641022 Nomor Faksimile : (0294) 641022 Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 50 orang
7.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jalan Raya Blora Km. 5 Kelurahan Turusgede Kecamatan Rembang



NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
	“TURUSGEDE” Rembang	Kabupaten Rembang 59251 Nomor Telp : (0295) 6998305 Nomor Fak : (0295) 6998305 Email: ppslu.turusgede@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 70 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia “MARGO MUKTI” Rembang	Jalan Diponegoro No. 90 A Kelurahan Pandean Kec Rembang Kab. Rembang 56211 Nomor Telepon : (0295) 691466 Nomor Faksimile : (0295) 691466 Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 75 orang
8.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “PANGRUKTI MULYO” Rembang	Jalan Raya Blora Km. 6 Kelurahan Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang 59251 Nomor Telepon : (0295) 6980008 Nomor Fak : (0295) 6980008 Email: ppsep.pangruktimulyo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Disabilitas Mental Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “PAMARDI KARYA” Blora	Jalan Raya Rembang KM. 10 Kelurahan Ngampel Kecamatan Blora Kabupaten Blora 58251 Nomor Telepon : (0296) 5101680 Nomor Fak : (0296) 5101680 Sasaran Pelayanan : Disabilitas Mental Kuota : 50 orang
9.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra “PENDOWO” Kudus	Jalan Pendowo Desa Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus 59319 Nomor Telepon : (0291) 438512 Nomor Faksimile : (0291) 438512 Email: ppsdn.pendowo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Kuota : 40 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “MURIA JAYA” Kudus	Jalan Conge Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus 59322 Nomor Telepon : (0291) 435130 Nomor Faksimile : (0291) 435130 Sasaran Pelayanan : Eks Psikotik Kuota : 50 orang
10.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “POTROYUDAN” Jepara	Jalan Pemuda No. 95 Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 59412 Nomor Telepon : (0291) 591041 Nomor Faksimile : (0291) 591041 Email : ppslu.potroyudan@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 80 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “WALUYOTOMO” Jepara	Jalan Tambak Sari Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 59417 Nomor Telepon : (0291) 598769



NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
		Nomor Faksimile : (0291) 598769 Sasaran Pelayanan : Eks Psikotik Kuota : 60 orang
11.	Panti Pelayanan Sosial Wanita "WANODYATAMA" Surakarta	Jalan Dr. Radjiman No. 624 Karangturi Kelurahan Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta 57146 Nomor Telepon : (0271) 712023 Nomor Fak: (0271) 712023 Email: ppsw.wanodyatama@gmail.com Sasaran Pelayanan : Eks Pekerja Seks Komersil Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra "BHAkti CANDRASA" Surakarta	Jalan Dr. Radjiman No. 622 Karangturi Kelurahan Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta 57146 Nomor Telepon : (0271) 716985 Nomor Fak : (0271) 716985 Sasaran Pelayanan : Penyandang Disabilitas Netra Kuota : 65 orang
12.	Panti Pelayanan Sosial Anak "TARUNA YODHA" Sukoharjo	Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 53 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 57512 Nomor Telepon:(0271) 593127 Nomor Faks:(0271) 593127 Email : ppsa.tyodha@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Putus Sekolah Kuota : 75 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "ESTITOMO" Wonogiri	Jalan Dahlia II/18 Jatirejo Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kab. Wonogiri 57615 Nomor Telepon :(0273) 322094 Nomor Faksimile :(0273) 322094 Sasaran Pelayanan : Eks Psikotik Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "HESTINING BUDI" Klaten	Jalan Rajawali Gang Rajawali Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah Kab.Klaten 57414 Nomor Telepon : (0272) 321827 Nomor Faksimile : (0272) 321827 Sasaran Pelayanan : Eks Psikotik Kuota : 50 orang
13.	Panti Pelayanan Sosial Anak "DHARMA PUTERA" Purworejo	Jalan Kartini No.9 Purworejo Kelurahan Sindurjan Kec. Purworejo Kab. Purworejo 54113 Nomor Telepon: (0275) 321757 Nomor Faks : (0275) 321757 Email: ppsa.dhputera@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Putus Sekolah Kuota : 75 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WILOSO WREDHO" Purworejo	Jalan Mangga No.14 Kelurahan Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo 54212 Nomor Telepon : (0275) 641025 Nomor Faksimile : (0275) 641025 Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 60 orang



NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Rungu Wicara “WIRA KARYA TAMA” Purworejo	Jalan Tunas Patria No. 19 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kab. Purworejo 54212 Nomor Telepon: (0275) 641371 Sasaran Pelayanan : Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Kuota : 40 orang
14.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “ADI YUSWO” Purworejo	Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 76 Purworejo Kel. Purworejo Kec Purworejo Kab. Purworejo 54111 Nomor Telepon : (0275) 322192 Nomor Faksimile : (0275) 322192 Email: ppslu.adiyuswo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar “MARDIGUNO” Kebumen	Jalan Slamet Riyadi No. 11 Kelurahan Prembun Kecamatan Prembun Kab. Kebumen 54394 Nomor Telepon : (0287) 662116 Nomor Faksimile : (0287) 662116 Sasaran Pelayanan : Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Kuota : 50 orang
15.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “DEWANATA” Cilacap	Jalan Raya Slarang No.119 Kelurahan Slarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap 53274 Nomor Telepon: (0282) 5263041 Nomor Faks: (0282) 5263041 Email: ppslu.dewanata@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “MARTANI” Cilacap	Jalan Wijaya kusuma No. 228 Kelurahan Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282 Nomor Telepon: (0282) 494275 Nomor Faksimile : (0282) 494275 Sasaran Pelayanan : Eks Psikotik Kuota : 80 orang
	Rumah Persinggahan Sosial “PAMARDI RAHARJO” Banjarnegara	Jalan Raya Pucang No. 5 Kelurahan Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara 53481 Nomor Telp : (0286) 5985025 Nomor Faks : (0286) 5985025 Sasaran Pelayanan : PMKS Kuota : 50 orang
16.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual “RAHARJO” Sragen	Jalan Raya Sragen – Solo KM. 2, Gambiran, Kelurahan Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen 57251 Nomor Telepon: (0271) 891410 Nomor Faks : (0271) 891410 Email : ppsdg.raharjo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Penyandang Disabilitas Grahita Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia “MOJOMULYO” Sragen	Jalan KH. Agus Salim No.1 Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen 57212 Nomor Telepon : (0271) 891155



NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
		Nomor Faksimile : - Sasaran Pelayanan : PMKS Kuota : 50 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Anak "PAMARDI SIWI" Sragen	Jalan RA. Kartini No. 8 Mojosari Kelurahan Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen 57212 Nomor Telepon : (0271) 891645 Nomor Faksimile : - Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Fisik "GONDANG" Sragen	Jalan Wisma Praja RT 14/IV Gondang Baru Gondang Sragen Nomor Telepon : (0271) 8852027 Nomor Faksimile : - Sasaran Pelayanan : Disabilitas Fisik Kuota : 50 orang
17.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik "SAMEKTO KARTI" Pemalang	Jalan Pabrik Comal Baru Kelurahan Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang 52364 Nomor Telepon:(0285) 577107 Nomor Faksimile :(0285) 577107 Email : ppsep.smkarti@gmail.com Sasaran Pelayanan : Eks Psikotik Kuota : 125 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Anak "PUTERA HARAPAN" Slawi	Jalan Aip KS. Tubun No. 5 Kelurahan Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal 52415 No Telepon : (0283) 491185 No Faksimile : (0283) 491185 Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 50 orang
18.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "BISMA UPAKARA" Pemalang	Jalan Raya Silarang-Pemalang Kelurahan Surajaya Kecamatan Pemalang Kab Pemalang 52319 Nomor Telepon: (0284) 3290345 Nomor Faks : (0284) 3290345 Email : pslu.bup86@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 100 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar "KARYA MANDIRI" Pemalang	Jalan Brigjend Katamso No. 52Kelurahan Sugihwaras Kec. Pemalang Kab.Pemalang 52319 Nomor Telepon: (0284) 321048 Nomor Faksimile : (0284) 321048 Sasaran Pelayanan : Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Kuota : 50 orang
19.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "BOJONGBATA" Pemalang	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No 4 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang52313 Nomor Telepon : (0284) 321041 Nomor Faks : (0284) 321041 Email : ppslu.bojongbata@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota :100 orang



NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra "DISTRARA STRA" Pemalang	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No 4 Kelurahan Bojombata Kec. Pemalang Kab. Pemalang 52313 Nomor Telepon : (0284) 321041 Nomor Faks : (0284) 321041 Email : ppslu.bojombata@gmail.com Sasaran Pelayanan : Disabilitas Sensorik Netra Kuota : 50 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "KLAMPOK" Brebes	Jalan Raya Klampok No. 69 Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 52252 Nomor Telepon : (0283) 6177722 Nomor Faks : (0283) 6177722 Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 90 orang
20.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra "PENGANTHI" Temanggung	Jalan Suyoto No.70 Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung Kab Temanggung 56217 Nomor Telepon: (0293) 491147 Nomor Faks: (0293) 491147 Email: ppsdn.penganthi@gmail.com Sasaran Pelayanan : Penyandang Disabilitas Netra Kuota : 80 orang
	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "MARDI YUWONO" Wonosobo	Jalan Ahmad Yani No. 84 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kab. Wonosobo 56314 Nomor Telepon: (0286) 321057 Nomor Faks : (0286) 321057 Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 70 orang
II.	UPT Type B	
21.	Panti Pelayanan Sosial Anak "KASIH MESRA" Demak	Jalan Betengan No. 7 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak 59511 Nomor Telepon : (0291) 685069 Nomor Faksimile : (0291) 685069 Email: spsa.kasihmesra@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 70 orang
22.	Panti Pelayanan Sosial Anak "PAMARDI UTOMO" Boyolali	Jalan Pandanaran No. 174 Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali Kab. Boyolali 57313 Nomor Telepon : (0276) 321076 Nomor Faksimile : (0276) 321076 Email : spsa.prutomo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 80 orang
23.	Panti Pelayanan Sosial Anak "SUKO MULYO" Tegal	Jalan Dr. Soetomo No. 50 Kelurahan Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal 52111 Nomor Telepon: (0283) 356394 Nomor Faks : (0283) 356394 Email: spsa.sukomulyo@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 80 orang

NO	NAMA PANTI DAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL	ALAMAT, SASARAN & KUOTA
24.	Panti Pelayanan Sosial Anak “WORO WILOSO” Salatiga	Jalan Diponegoro No. 85 Kelurahan Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga 50714 Nomor Telepon : (0298) 322920 Nomor Faksimile : (0298) 322920 Email : spsa.wrwiloso@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 105 orang
25	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “SUDAGARAN” Banyumas	Jalan Karangsawah No. 73 Kelurahan Sudagaran Kecamatan Banyumas Kab. Banyumas 53192 Nomor Telepon : (0281) 796074 Nomor Faksimile : (0281) 796074 Email: ppslu.sudagaran@gmail.com Sasaran Pelayanan : Lanjut Usia Terlantar Kuota : 100 orang
26	Panti Pelayanan Sosial Anak “TAWANGMANGU” Karanganyar	Jalan Raya Lawu No. 73 Kel. TawangmanguKec. Tawangmangu Kab. Karanganyar 57792 Nomor Telepon:(0271) 697245 Nomor Faksimile :(0271) 697245 Email: ppsa.tawangmangu@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Jalanan Kuota : 75 orang
27.	Panti Pelayanan Sosial Anak “KUMUDA PUTERA PUTERI” Magelang	Jalan Alibasah Sp. No. 940 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang 56112 Nomor Telepon : (0293) 362572 Nomor Faksimile : (0293) 362572 Email: spsa.kumudapp@gmail.com Sasaran Pelayanan : Anak Terlantar Kuota : 100 orang

Gambar 6.2
Sebaran lokasi Panti dan Rumah Pelayanan Sosial di Jawa Tengah



Sumber Google Maps



6.3 Kebijakan dan Program Kerja SKPD

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi serta berbagai dampaknya, dimana bila kita abaikan akan mengarah pada terjadinya disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk menjamin terlaksananya usaha kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara sinergis, simultan, dan berkelanjutan, serta dirumuskan dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab bidang-bidang, yaitu :

a. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan sosial



korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan data kemiskinan, penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan daerah rentan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021. Penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan entitas akuntansi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses Akuntansi SKPD mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan manual
- b. Entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- c. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi SKPD dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan
- d. Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran tidak terdapat saldo kas berupa hutang pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2021. Fokus belanja selain tetap menjaga mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada Tahun Anggaran 2021 fokus belanja utamanya demi menjaga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masuk dalam *cluster* kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan dalam panti tidak terpapar Covid 19.



- e. Persediaan barang yang masih ada di Petugas Penyimpan Barang telah dikalkulasi secara cermat dan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- f. Aset Tetap yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi penambahan dan pengurangan aset, antara lain :
 - 1) Penambahan
 - a) Tanah
 - b) Alat Besar
 - c) Alat Angkut
 - d) Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - e) Alat Pertanian
 - f) Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - g) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - h) Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan
 - i) Alat Komputer
 - j) Bahan Perpustakaan
 - 2) Pengurangan
 - a) Tanah
 - b) Alat-alat besar
 - c) Alat Angkutan
 - d) Alat bengkel dan Alat Ukur
 - e) Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f) Alat Studio Komunikasi dan Pemancar
 - g) Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - h) Alat Komputer
- g. Pendapatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2020.
- h. Belanja yang terdiri dari Belanja operasi telah dialokasikan dalam program / kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta untuk mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024 - 8311729
Faksimile 024 - 8450704 laman <http://www.dinsos.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinsos@jatengprov.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME SISA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS

Nomor : 028/010/2021

Pada hari ini **Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudhy Setyawan
NIP : 19770726 200801 1 004
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa kami telah melakukan stock opname Barang Persediaan untuk saldo akhir Tahun 2021, pertanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara stock opname:

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 3.310.149,-
2. Cetak	Rp. 0,-
3. Alat Kebersihan	Rp. 150.000,-
4. Obat – obatan	Rp. 6.915.391,-
5. Alat Listrik	Rp. 0,-
6. Benda Pos	<u>Rp. 4.450.000,-</u>
	Rp. 14.825.540,-

Demikian Berita Acara Stock Opname Sisa Barang Pakai Habis ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH



HARSO SUSILO, ST, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19710509 199903 1 003

PENGURUS BARANG
PENGGUNA

YUDHY SETYAWAN

Pengatur Tingkat I

NIP. 19770726 200801 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Semarang (024) 8311174 (20 Saluran) Fax. (024) 8311172
Semarang – 50243

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR : 030/0006066

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS RODA 4 (EMPAT)
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc.Sc.
NIP : 19611115 198603 1 010.
Pangkat : Pembina Utama Madya.
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah.
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : HARSO SUSILO, ST, MM.
NIP : 19710509 199903 1 003.
Pangkat : Pembina Tingkat I.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial.
Alamat : Jl. Pahlawan No. 12 Semarang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar :

- a. Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/670 tanggal 23 Maret 2021 perihal Permohonan Kendaraan Operasional.
- b. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 030/0006065 tanggal 15 April 2021 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JalanSriwijayaNomor 29 KodePos 50614 Telepon 024-8311172
Facsimile (024) 8311172 laman<http://bpkad.jatengprov.go.id>
Surat elektronik: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
REKONSILIASI/DESK LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2021
ANTARA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH DAN
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 030/1832.1

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Ruang Rapat Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Lantai 12 Gedung A Setda, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Nanik Purwani, SH
NIP. : 196504071989072001
Jabatan : Staf subbid Penatausahaan Barang Daerah dan Penetapan Status Penggunaan Barang Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Yudhy Setyawan
NIP : 197707262008011004
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai PIHAK KEDUA"

Kedua belah pihak telah melakukan Rekonsiliasi/Desk Laporan Semester I Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Perolehan Lain yang sah, yang mempengaruhi perubahan Nilai BMD Tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	SALDO AWAL periode 202107		PENAMBAHAN		PELEPASAN		SALDO AKHIR PERIODE	
		Jml.	Harga	Jml.	Jumlah Tambah	perlo de 20210 8	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
1	1.3.1.01 TANAH	102	135.203.297.940,00	-	-	-	-	102	135.203.297.940,00
2	1.3.2.01 ALAT BESAR	49	1.451.251.798,00	-	-	-	-	49	1.451.251.798,00
3	1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	308	16.188.168.048,00	1	162.623.390,00	-	-	309	16.350.791.438,00
4	1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	126	442.299.050,00	-	-	-	-	126	442.299.050,00
5	1.3.2.04 ALAT PERTANIAN	5	38.485.000,00	-	-	-	-	5	38.485.000,00
6	1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.559	22.801.200.669,00	73	281.114.984,00	11	37.590.000,00	9.621	23.044.725.653,00
7	1.3.2.06 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	146	556.077.784,00	2	3.900.000,00	-	-	148	559.977.784,00
8	1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	257	932.702.321,00	-	-	-	-	257	932.702.321,00
9	1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM	15	100.035.000,00	-	-	-	-	15	100.035.000,00
10	1.3.2.09 ALAT PERSENIJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.10 ALAT KOMPUTER	797	6.295.573.650,00	10	222.760.000,00	1	99.500.000,00	806	6.418.833.650,00
12	1.3.2.11 ALAT EKSPLOKASI	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLOKASI	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.16 ALAT PERAGA	3	23.000.000,00	-	-	-	-	3	23.000.000,00
18	1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.18 RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA	21	71.050.000,00	-	-	-	-	21	71.050.000,00
21	1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	787	189.549.650.431,00	4	768.596.000,00	1	130.800.000,00	790	190.187.446.431,00
22	1.3.3.02 MANDUMEN	2	32.619.000,00	-	-	-	-	2	32.619.000,00
23	1.3.3.03 BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	1.561.874.500,00	-	-	-	-	6	1.561.874.500,00
25	1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN	3	52.859.000,00	5	1.128.134.000,00	-	-	11	2.690.008.500,00
26	1.3.4.02 BANGUNAN AIR	34	2.686.311.069,00	-	-	-	-	34	2.686.311.069,00
27	1.3.4.03 INSTALASI	2	25.000.000,00	-	-	-	-	2	25.000.000,00
28	1.3.4.04 JARINGAN	5	82.834.000,00	-	-	-	-	5	82.834.000,00
29	1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN	8.838	482.999.800,00	-	-	-	-	8.838	482.999.800,00
30	1.3.5.02 BARANG BERCORAK	256	680.504.300,00	-	-	-	-	256	680.504.300,00
31	1.3.6.01 KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
		21.321	379.257.793.360,00	95	2.567.128.374,00	13	267.890.000,00	21.403	381.957.031.734,00